

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

J. TRUSMI NO. 3 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN

Dr. Tri Siswanti, S.Sos., M.AP
Dr. Kusnida Indrajaya
Al Rakhaa H.M.

ETIKA PROFESI POLRI

TANTANGAN INTEGRITAS DAN BRAND
INSTITUSI DI ERA MILENIAL



EDITOR: Dr. Naidi Faisal, S.IP., M.Si

ETIKA PROFESI POLRI, TANTANGAN INTEGRITAS DAN BRAND INSTITUSI DI ERA MILENIAL

Penulis:

Dr. Tri Siswanti, S.Sos., M.AP.

Dr. Kusnida Indraajaya

Al Rakhaa H.M.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

ETIKA PROFESI POLRI, TANTANGAN INTEGRITAS DAN BRAND INSTITUSI DI ERA MILENIAL

Copyright @2025 By Dr. Tri Siswanti, S.Sos., M.AP.Dkk.

All right reserved

Penulis

Dr. Tri Siswanti, S.Sos., M.AP.

Dr. Kusnida Indrajaya

Al Rakhaa H.M.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

AtikaNS

Editor

Dr. Naidi Faisal, S.IP., M.Si

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-129-6

Cetakan ke-1, April 2026

15,5 x 23 cm, vi+ 355 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Buku ini hadir untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pentingnya etika dan integritas dalam profesi kepolisian, serta tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan tugasnya di era milenial. Dalam perjalanan sejarahnya, Polri telah berperan sebagai lembaga yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, namun tantangan yang terus berkembang di dunia digital dan perubahan sosial yang pesat menuntut adanya transformasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal etika profesi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan pergeseran nilai-nilai sosial, Polri tidak hanya dihadapkan pada tantangan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga pada tantangan moral yang menguji integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil. Buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penguatan etika di Polri, termasuk pembekalan pendidikan etika, penguatan kepemimpinan yang beretika, serta pentingnya pengawasan eksternal yang objektif.

Dalam konteks reformasi Polri yang terus berlanjut, buku ini juga mengulas bagaimana Polri dapat menjadi agen perubahan sosial yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat melalui prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Penguatan brand institusi Polri yang berintegritas di mata publik menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, serta

menciptakan Polri yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

Harapan penulis, melalui buku ini, pembaca dapat memahami pentingnya peran etika dalam menjaga profesionalisme Polri, serta bagaimana Polri dapat terus berkembang menjadi lembaga yang lebih akuntabel, responsif, dan dapat diandalkan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemikiran mengenai reformasi kepolisian di Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi institusi Polri dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Hormat saya,

Tri Siswanti

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB 1

TANTANGAN INTEGRITAS POLRI DI ERA MILENIAL	1
1.1. Peran Individu dalam Mempertahankan Integritas Penegakan Hukum	6
1.2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Etika oleh Anggota Polri di Era Digital	19
1.3. Faktor Sistemik dan Sosial dalam Polri	36
1.4. Pentingnya Pendidikan Etika dalam Pembinaan Polri untuk Meningkatkan Integritas	37
1.5. Pengawasan Eksternal sebagai Pilar Penguatan Kepatuhan Etika di Polri	55
1.6. Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Etika di Polri di Tengah Perubahan Sosial	73

BAB 2

PELANGGARAN KODE ETIK POLRI: MENGHADAPI TANTANGAN CITA-CITA INSTITUSI	93
2.1. Kasus-Kasus Pelanggaran Etika yang Menonjol dan Dampaknya pada Brand Polri	94
2.2. Penyebab Utama Pelanggaran Etika oleh Anggota Polri di Era Milenial	112
2.3. Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Pengawasan Etika yang Efektif	127

2.4. Reaksi Masyarakat terhadap Pelanggaran Etika Polri di Era Sosial Media -----	141
2.5. Pelajaran yang Dapat Diambil dari Kasus Pelanggaran Etika dalam Memperbaiki Brand Polri -----	152

BAB 3

ETIKA POLRI DI ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DAN MENGUKUHKAN BRAND

INSTITUSI-----	165
3.1. Peran Teknologi dalam Memperkuat Pengawasan dan Kepatuhan Etika di Polri-----	166
3.2. Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Polri -----	174
3.3. Pendidikan Etika Polri di Era Digital: Peluang dan Tantangan-----	183
3.4. Peran Media dalam Menyoroti Pelanggaran Etika Polri dan Dampaknya pada Brand -----	190
3.5. Kesadaran Digital dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Etika Anggota Polri-----	200

BAB 4

MENDALAMI PEMBINAAN ETIKA POLRI UNTUK MENINGKATKAN INTEGRITAS DI ERA MILENIAL -----

4.1. Pentingnya Pendidikan Etika dalam Pembinaan Polri untuk Meningkatkan Profesionalisme -----	216
4.2. Pelatihan Berkelanjutan sebagai Solusi dalam Pembinaan Anggota Polri yang Berintegritas -----	224
4.3. Membangun Karakter Polri yang Profesional dan Beretika dalam Konteks Milenial -----	230
4.4. Peran Kepemimpinan dalam Penegakan Etika dan Integritas di Polri-----	237
4.5. Program Mentoring dan Pembinaan Kode Etik untuk Anggota Polri Muda di Era Milenial-----	243
4.6. Membangun Budaya Etika yang Kuat dalam Polri -----	248

BAB 5

MENGUKUR AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI POLRI-----251

- 5.1. Mekanisme Pengawasan Eksternal yang Efektif dalam
Menjamin Kepatuhan Etika Polri-----252
- 5.2. Peningkatan Transparansi dalam Proses Penegakan
Hukum Polri di Era Digital -----258
- 5.3. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan
Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum-----264
- 5.4. Sistem Pengaduan Publik sebagai Alat Mencegah
Pelanggaran Etika Polri-----271
- 5.5. Mengurangi Impunitas dalam Polri melalui Akuntabilitas
yang Tegas dan Efektif-----278

BAB 6

STRATEGI REFORMASI UNTUK MENINGKATKAN ETIKA DI POLRI DI ERA MILENIAL -----285

- 6.1. Peran Reformasi dalam Meningkatkan Kepatuhan
Kode Etik Polri di Era Milenial-----286
- 6.2. Penerapan Sanksi yang Adil dan Efektif dalam
Menegakkan Etika Polri -----288
- 6.3. Mengembangkan Budaya Etika yang Kuat di Polri
untuk Menjaga Brand Institusi-----297
- 6.4. Reformasi Kepemimpinan Polri untuk Meningkatkan
Etika di Kalangan Anggota -----303
- 6.5. Evaluasi dan Monitoring Kinerja dalam Penerapan
Etika Polri di Era Milenial-----309

BAB 7

MEMPERKUAT KEPATUHAN ETIKA POLRI UNTUK MENJALIN KEBERLANJUTAN KADILAN -----315

- 7.1. Menghadirkan Polri yang Lebih Transparan, Beretika,
dan Dapat Dipercaya Masyarakat-----316

7.2. Pendidikan Berkelanjutan untuk Penguatan Etika di Polri dalam Konteks Milenial -----	322
7.3. Harapan Generasi Milenial terhadap Polri yang Profesional, Berintegritas, dan Responsif-----	331
7.4. Tanggung Jawab Sosial Polri dalam Mewujudkan Keadilan di Era Milenial-----	335
7.5. Kesimpulan: Menuju Polri yang Lebih Etis, Profesional, dan Akuntabel di Masa Depan -----	340
DAFTAR PUSTAKA -----	353
PROFIL PENULIS -----	355

Bab 1

TANTANGAN INTEGRITAS POLRI DI ERA MILENIAL

Di tengah kemajuan pesat teknologi dan dinamika sosial yang terus berkembang, integritas menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh institusi Polri di era milenial. Transformasi zaman membawa perubahan yang signifikan, tidak hanya pada cara kita berinteraksi, tetapi juga pada cara kita memandang dan menilai institusi penegak hukum, termasuk Polri. Keterbukaan informasi yang semakin meningkat, cepatnya penyebaran berita melalui media sosial, serta tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan, memaksa Polri untuk selalu menjaga profesionalisme dan etika dalam setiap langkahnya.

Pola interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat telah berubah drastis. Dulu, komunikasi antara Polri dan masyarakat lebih bersifat satu arah, dengan Polri sebagai pihak yang lebih dominan dalam memberikan informasi dan kebijakan. Namun, kini masyarakat memiliki akses yang jauh lebih besar untuk berinteraksi dan menilai tindakan Polri, berkat perkembangan teknologi dan media sosial. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang bersifat positif maupun negatif, bisa dengan cepat tersebar luas, diperdebatkan, dan dibahas oleh masyarakat di berbagai platform digital.

Masyarakat saat ini tidak hanya menginginkan transparansi, tetapi juga bertindak sebagai pengawas yang aktif terhadap tindakan aparat penegak hukum. Media sosial, misalnya, tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengkritisi dan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini semakin memperbesar tantangan integritas yang dihadapi Polri, karena mereka harus mampu menjaga citra dan kredibilitas mereka dalam kondisi yang semakin terpantau publik.

Salah satu aspek penting dalam mempertahankan integritas Polri adalah peran individu. Setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga etika dan integritas mereka dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab moral ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas secara profesional, tetapi juga bagaimana seorang anggota Polri menjaga sikap dan perilaku pribadi yang mencerminkan nilai-nilai etika Polri. Dalam konteks ini, peran individu sangat besar, karena tindakan yang dilakukan oleh satu orang bisa memengaruhi persepsi publik terhadap seluruh institusi.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, sebuah kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri yang terlibat dalam pemerasan sempat viral di media sosial. Seorang anggota Polri yang melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha kecil menciptakan dampak buruk bagi Polri secara keseluruhan. Kejadian ini tidak hanya merusak reputasi pribadi anggota Polri yang terlibat, tetapi juga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat. Kasus ini menyadarkan kita bahwa setiap individu di dalam Polri harus selalu menjaga integritas mereka, karena apa yang mereka lakukan dapat memengaruhi citra institusi yang mereka wakili.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak juga contoh positif yang menunjukkan bagaimana anggota Polri dapat menjaga integritas mereka dalam menghadapi tantangan. Misalnya, dalam kasus penanganan protes atau demonstrasi yang sering kali penuh dengan ketegangan, sejumlah anggota Polri telah menunjukkan sikap yang profesional dan beretika, dengan mengedepankan prinsip-prinsip humanisme dan menghindari kekerasan yang berlebihan. Dalam situasi seperti ini, sikap anggota Polri yang menjaga kedamaian dan merespons dengan bijak terhadap tuntutan masyarakat justru memperkuat hubungan antara Polri dan publik, serta menjaga citra positif institusi.

Di era digital saat ini, pengaruh teknologi dan media sosial menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam menjaga integritas Polri. Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk menilai tindakan Polri secara lebih terbuka dan langsung. Setiap kejadian yang melibatkan anggota Polri, baik yang terjadi di lapangan maupun di ruang publik, dapat dengan cepat tersebar luas melalui berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Di sisi lain, media sosial juga memberikan kesempatan bagi Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat, menjelaskan tindakan mereka, serta memberikan klarifikasi terkait informasi yang mungkin salah atau menyesatkan.

Namun, dampak negatif dari media sosial tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu tantangan terbesar adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks yang dapat merusak integritas Polri. Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, sebuah video yang menunjukkan tindakan kekerasan oleh anggota Polri terhadap demonstran disebarluaskan secara luas melalui media sosial. Meskipun kemudian terbukti bahwa video tersebut merupakan potongan yang diputarbalikkan dan tidak mencerminkan keseluruhan konteks kejadian, namun dampak dari penyebaran video tersebut sangat besar,

menimbulkan ketegangan antara Polri dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap Polri.

Namun, teknologi juga menawarkan solusi untuk memperkuat integritas Polri. Salah satunya adalah penggunaan media sosial oleh Polri untuk melakukan transparansi dan memperbaiki citra mereka. Polri dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi yang benar, memberikan klarifikasi, serta menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Hal ini penting, karena masyarakat kini menginginkan akses yang lebih besar terhadap informasi terkait kebijakan dan tindakan Polri, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka dengan aparat penegak hukum.

Tuntutan masyarakat akan transparansi dan keadilan semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya kesadaran sosial dan perubahan norma budaya di masyarakat. Dalam era milenial ini, masyarakat lebih kritis dan terbuka terhadap tindakan Polri. Mereka mengharapkan Polri untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga untuk selalu bertindak dengan penuh integritas dan profesionalisme, serta mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi mereka.

Masyarakat kini menginginkan bukti nyata bahwa Polri berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Ekspektasi masyarakat yang tinggi ini sering kali memberikan tekanan yang besar pada Polri. Di satu sisi, hal ini mendorong Polri untuk lebih baik dalam menjalankan tugasnya dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Namun, di sisi lain, tekanan ini juga bisa menambah beban mental dan emosional bagi anggota Polri, terutama dalam situasi yang penuh ketegangan dan konflik.

Contoh nyata dari dinamika sosial yang memengaruhi Polri adalah respons terhadap penanganan protes besar-besaran yang

terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Misalnya, selama demonstrasi mahasiswa beberapa tahun lalu, tuntutan masyarakat akan keadilan dan transparansi sangat kuat. Polri dihadapkan pada situasi yang sangat menantang, di mana mereka harus menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus menghormati hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka. Dalam situasi ini, Polri diharapkan untuk tidak hanya bertindak sesuai dengan prosedur, tetapi juga dengan penuh perhatian terhadap hak asasi manusia, serta menghindari penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, sangat penting bagi Polri untuk melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga integritas dan brand institusi. Masyarakat bukan hanya berperan sebagai pengawas eksternal, tetapi juga sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, mengkritisi kebijakan, dan memberikan dukungan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Polri dan publik. Dengan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Polri, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menilai tindakan Polri dan berperan aktif dalam memperbaiki sistem dan kebijakan yang ada.

Pendidikan masyarakat mengenai pentingnya integritas Polri juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tugas dan tanggung jawab Polri, serta bagaimana mereka dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sinergi antara Polri dan masyarakat dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih adil dan profesional.



Gambar 1. Ilustrasi Integritas Polri

1.1. Peran Individu dalam Mempertahankan Integritas Penegakan Hukum

Integritas dalam konteks Polri adalah landasan utama yang mendasari setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggotanya. Sebagai institusi yang bertugas menegakkan hukum, Polri diharapkan tidak hanya bertindak secara profesional tetapi juga dengan penuh tanggung jawab, memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Integritas ini mencakup kejujuran, ketulusan, serta kesadaran akan pentingnya menjalankan tugas tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Setiap individu di dalam Polri memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tidak berpihak. Tanggung jawab ini lebih dari sekadar menjalankan peraturan; ia mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan

yang mengedepankan kepercayaan publik dan mencerminkan komitmen pada keadilan.

Tindakan individu dalam Polri tidak hanya berdampak pada tugas yang diemban, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap brand institusi secara keseluruhan. Masyarakat, sebagai pihak yang dilayani, seringkali menilai kualitas institusi berdasarkan perilaku dan sikap anggotanya. Oleh karena itu, setiap tindakan anggota Polri, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan memberikan dampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap Polri. Ketika seorang anggota Polri gagal menjaga integritasnya, misalnya dalam hal penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan dalam menjalankan tugas, dampaknya akan terasa jauh lebih luas, bukan hanya pada individu tersebut, tetapi juga pada reputasi Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Studi kasus mengenai pelanggaran yang terjadi akibat ketidakpedulian terhadap integritas memperlihatkan betapa pentingnya kesadaran setiap individu dalam menjaga kredibilitas Polri. Misalnya, beberapa kasus pelanggaran yang viral di media sosial menunjukkan bagaimana tindakan tidak etis dari anggota Polri bisa merusak hubungan antara institusi dan masyarakat. Ketika ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang terjadi, masyarakat akan merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka. Inilah mengapa peran individu dalam menjaga integritas sangatlah krusial. Setiap anggota Polri harus selalu sadar bahwa mereka bukan hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi juga seluruh institusi yang mereka wakili.

Namun, di sisi lain, peran anggota Polri dalam menjaga nama baik institusi sangat penting untuk diperkuat. Melalui sikap profesional, beretika, dan menjaga komitmen terhadap integritas dalam setiap tindakan, mereka tidak hanya membantu membangun brand positif Polri, tetapi juga memastikan

keberlanjutan kepercayaan masyarakat. Ini adalah tugas bersama yang memerlukan kesadaran dan penguatan dari setiap individu di dalam Polri untuk selalu menjadi teladan yang baik. Pembinaan yang terus menerus, baik melalui pendidikan etika maupun pengawasan internal yang ketat, sangat diperlukan agar setiap anggota Polri dapat berperan aktif dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi.

A. Menjaga Etika Pribadi dalam Penegakan Hukum

Setiap individu dalam Polri memegang tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Integritas anggota Polri diuji bukan hanya dalam menjalankan tugas, tetapi juga dalam hal menjaga sikap dan perilaku pribadi yang dapat mencerminkan citra institusi. Dalam situasi yang penuh tekanan, baik secara internal maupun eksternal, anggota Polri diharapkan tetap teguh pada prinsip-prinsip etika yang mendasari setiap tindakan mereka.

Salah satu tantangan terbesar adalah menghindari godaan untuk menyimpang dari norma-norma etika, terutama saat dihadapkan pada situasi yang menguji moralitas. Tekanan dari atasan, teman sejawat, atau bahkan masyarakat yang menuntut hasil instan, sering kali menjadi faktor pendorong bagi anggota Polri untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan standar etika. Dalam kondisi demikian, penting bagi setiap anggota Polri untuk selalu mengingat tujuan utama mereka sebagai penegak hukum, yaitu menjaga keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat, bukan justru terjebak dalam tindakan yang dapat merusak kredibilitas mereka sendiri dan lembaga yang mereka wakili.

Salah satu cara untuk menjaga etika pribadi adalah dengan membangun kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap tindakan. Setiap keputusan yang diambil oleh anggota Polri tidak

hanya berdampak pada kasus yang sedang ditangani, tetapi juga pada reputasi institusi Polri itu sendiri. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam penegakan hukum harus menjadi komitmen setiap individu, yang harus terus dijaga dalam setiap langkah yang diambil. Setiap anggota Polri harus menyadari bahwa mereka adalah teladan bagi masyarakat. Masyarakat akan menilai Polri bukan hanya dari tindakan kolektif institusi, tetapi juga dari sikap dan perilaku individu anggota Polri. Oleh karena itu, integritas pribadi anggota Polri harus selalu dijaga, agar tidak hanya tercipta keadilan bagi mereka yang terlibat dalam penegakan hukum, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota untuk mempertahankan sikap profesional dan etis, bahkan dalam menghadapi tekanan yang berat. Dalam hal ini, Polri perlu menegaskan bahwa menjaga etika tidak hanya terkait dengan menjalankan tugas dengan benar, tetapi juga dengan komitmen untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas institusi.

Peraturan Polri No. 3 Tahun 2024 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pentingnya menjaga perilaku etis dan profesional dalam setiap aspek pekerjaan anggota Polri. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban setiap anggota Polri untuk mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, baik dalam menjalankan tugas penegakan hukum, interaksi dengan masyarakat, maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Salah satu hal penting yang tercantum dalam peraturan ini adalah kewajiban setiap anggota Polri untuk menjaga integritas, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam konteks menjaga etika pribadi, Peraturan Polri No. 3 Tahun 2024 memberikan panduan yang sangat jelas mengenai tindakan apa saja yang dianggap melanggar etika dan dapat

merusak integritas Polri, seperti penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan yang tidak objektif, dan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam peraturan ini juga ditegaskan bahwa setiap anggota Polri harus menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan citra positif Polri di mata masyarakat.

Selain itu, peraturan ini juga menyatakan pentingnya pendidikan dan pembinaan etika secara berkelanjutan bagi setiap anggota Polri. Pembinaan ini tidak hanya mencakup aspek pengetahuan tentang hukum, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam setiap tindakan, baik dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai individu dalam masyarakat.

Mengacu pada peraturan ini, setiap anggota Polri diharapkan mampu bertindak secara transparan, adil, dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya dalam situasi yang mudah, tetapi juga dalam situasi yang penuh tantangan dan tekanan. Dengan menjaga etika pribadi yang tinggi, anggota Polri tidak hanya memperkuat integritas diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum yang kredibel dan profesional.

Peraturan Polri No. 3 Tahun 2024 menjadi landasan yang sangat penting dalam memperkuat komitmen setiap anggota Polri untuk menjaga etika dalam setiap aspek kehidupan mereka. Melalui pembinaan yang berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip etika yang konsisten, diharapkan Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya, serta menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghargai dengan masyarakat.

B. Pendidikan dan Pembinaan Etika sebagai Landasan Kekuatan Pribadi

Pendidikan etika di Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan integritas setiap anggotanya. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum, Polri tidak hanya membutuhkan individu yang kompeten secara teknis, tetapi juga individu yang memiliki integritas dan karakter yang kuat. Pendidikan etika di Polri bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral yang harus dijalankan, baik dalam kapasitas mereka sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai anggota masyarakat.

Etika di Polri bukan hanya soal mengetahui dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini sangat penting karena anggota Polri sering kali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan tekanan dan godaan, baik dari dalam tubuh institusi maupun dari lingkungan eksternal. Tanpa dasar moral yang kuat, individu yang tertekan bisa saja melakukan penyimpangan yang berakibat merusak reputasi pribadi dan institusi.

Pendidikan etika di Polri berfungsi untuk membentuk kesadaran diri yang tinggi pada setiap anggota, agar mereka tidak hanya memahami kewajiban mereka dalam menegakkan hukum, tetapi juga mampu menghadapi situasi yang penuh tantangan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang benar. Dalam hal ini, etika bukan hanya menjadi pedoman untuk tindakan, tetapi juga menjadi refleksi dari karakter dan pribadi seorang anggota Polri.

Namun, pendidikan etika tidak bisa hanya dilakukan sekali saja dalam pelatihan awal. Agar dapat membentuk integritas yang sejati, pembinaan etika harus bersifat berkelanjutan dan terintegrasi dalam seluruh tahapan karir anggota Polri. Pembinaan etika yang terus-menerus akan memperkuat pemahaman anggota tentang nilai-nilai moral, serta membantu mereka untuk selalu menilai setiap situasi dengan bijak dan objektif. Hal ini penting untuk menghindari godaan melakukan tindakan yang tidak etis, terutama ketika mereka dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan atau konflik kepentingan.

1. Pembinaan yang Tidak Cukup atau Kurang Berkelanjutan

Namun, jika pembinaan etika di Polri tidak dilakukan dengan baik atau tidak berkelanjutan, risiko munculnya tindakan yang melanggar kode etik menjadi sangat besar. Tanpa adanya landasan moral yang kuat, anggota Polri akan mudah terpengaruh oleh godaan yang datang, baik itu dalam bentuk tekanan eksternal dari atasan, rekan sejawat, maupun masyarakat yang sering kali menuntut hasil cepat. Selain itu, dalam situasi yang penuh tekanan, seperti menangani kasus yang berat atau konflik sosial yang kompleks, individu yang tidak memiliki kekuatan moral yang kokoh dapat terjebak dalam keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip etika, demi memenuhi ekspektasi yang tidak realistis.

Misalnya, dalam situasi darurat atau saat menghadapi godaan materiil, anggota Polri yang tidak memiliki pembinaan etika yang memadai bisa tergoda untuk melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan kekerasan yang berlebihan. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merusak kredibilitas individu, tetapi juga merusak citra Polri secara keseluruhan.

2. Pentingnya Pembinaan Etika Berkelanjutan

Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk memastikan bahwa pendidikan dan pembinaan etika tidak hanya dilakukan pada tahap awal rekrutmen, tetapi juga secara berkelanjutan selama perjalanan karir anggota. Pembinaan etika berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan rutin, evaluasi perilaku anggota, dan penerapan sistem pengawasan yang ketat. Selain itu, pembinaan etika juga dapat disesuaikan dengan tantangan zaman, seperti pengaruh media sosial dan teknologi digital yang semakin berkembang. Anggota Polri perlu dibekali dengan pemahaman tentang etika digital dan cara menjaga profesionalisme serta integritas di dunia maya, di mana keputusan yang salah dapat dengan cepat tersebar luas dan merusak reputasi mereka.

Program pelatihan etika yang efektif juga perlu memasukkan aspek-aspek praktis yang memungkinkan anggota Polri untuk menghadapi situasi-situasi sulit dengan integritas yang tinggi. Misalnya, melalui simulasi kasus nyata yang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan etis dalam situasi yang penuh tekanan, serta diskusi tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh rekan sejawat. Pendekatan ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi dilema etika yang mungkin terjadi di lapangan, dan memastikan bahwa mereka selalu dapat memilih tindakan yang sesuai dengan kode etik Polri.

3. Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi dalam Pembinaan Etika

Selain pembinaan yang berkelanjutan, sistem pengawasan yang efektif juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri dapat mempertahankan integritas dan profesionalisme mereka. Pengawasan ini tidak hanya berasal dari atasan, tetapi juga melalui evaluasi diri anggota Polri yang harus selalu menilai kembali tindakannya dan mempertimbangkan

dampak dari setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, feedback dan evaluasi yang konstruktif akan membantu anggota Polri untuk selalu memperbaiki diri dan memperkuat komitmen mereka terhadap etika.

Pengawasan eksternal, seperti peran masyarakat dan media, juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa Polri tetap berada di jalur yang benar dalam menjalankan tugasnya. Kolaborasi yang erat antara Polri, lembaga pengawas, dan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan etika di Polri.

C. Kolaborasi dalam Memperkuat Integritas

Setiap individu dalam Polri juga memiliki peran penting dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan oleh rekan sejawat maupun oleh individu lain di dalam sistem Polri. Akuntabilitas adalah kunci dalam memastikan bahwa integritas tidak hanya dijaga oleh individu, tetapi juga ditegakkan oleh seluruh lembaga. Setiap anggota Polri harus merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi, serta berani untuk mengambil tindakan apabila melihat ketidakberesan yang merugikan masyarakat atau mencoreng nama baik Polri.

Selain itu, anggota Polri harus mampu menunjukkan sikap transparansi dalam setiap langkah yang mereka ambil. Tindakan yang tidak transparan akan membuka celah bagi kecurigaan dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai contoh, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polri harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip hukum yang berlaku, bukan karena adanya intervensi atau motif pribadi.

D. Kolaborasi dalam Memperkuat Integritas

Menjaga integritas Polri bukan hanya menjadi tugas individu, tetapi keberhasilan dalam mencapainya sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara anggota Polri dan masyarakat. Integritas, yang merupakan nilai dasar dalam penegakan hukum, akan lebih kuat ketika setiap elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam proses pengawasan, memberikan masukan, dan mendukung kebijakan yang ada. Dalam era informasi yang serba terbuka ini, masyarakat memiliki akses yang lebih besar dan lebih cepat dalam mengamati, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap kinerja Polri.

Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas Polri sebagai institusi publik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat akan memastikan bahwa Polri tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip etika. Pengawasan yang sehat dari masyarakat dapat menjadi pendorong bagi Polri untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya, sehingga citra Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan dapat dipercaya terus terjaga.

Penting untuk dipahami bahwa pengawasan terhadap Polri bukan hanya dilakukan oleh lembaga internal Polri, tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga-lembaga pengawasan eksternal. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran mereka sebagai pengawas eksternal yang aktif. Dengan adanya kesadaran ini, diharapkan masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengkritisi, tetapi juga sebagai mitra yang memberikan masukan konstruktif dalam upaya perbaikan kinerja Polri.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat menjadi sangat krusial di era digital ini. Informasi yang tersebar melalui media sosial dapat dengan cepat sampai ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu informasi positif maupun negatif tentang tindakan anggota Polri. Pengawasan yang transparan dan berbasis pada informasi yang akurat memungkinkan Polri untuk segera merespons dan memperbaiki tindakan yang kurang tepat. Di sisi lain, masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran etika dapat menjadi bagian dari upaya menjaga integritas Polri, dengan melaporkan penyimpangan yang terjadi dan mendukung tindakan yang benar.

Untuk memastikan keterlibatan masyarakat yang efektif dalam pengawasan, Polri perlu mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pengawasan ini. Edukasi ini akan menciptakan suasana saling percaya antara Polri dan masyarakat, di mana kedua belah pihak memahami peran mereka dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pengawasan yang baik, masyarakat akan merasa bahwa mereka memiliki andil dalam menjaga kualitas penegakan hukum, sementara Polri dapat lebih terbuka dalam setiap tindakannya.

Salah satu cara Polri bisa mengedukasi masyarakat adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan kinerja polisi, seperti forum dialog publik, sosialisasi terkait peran masyarakat dalam pengawasan, dan kampanye kesadaran hukum. Program-program ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang pentingnya pengawasan, tetapi juga membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri.

Terdapat beberapa contoh nyata yang menunjukkan bagaimana kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam

pengawasan dapat memperkuat integritas dan profesionalisme institusi ini.

1. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Laporan Masyarakat

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) adalah lembaga pengawas eksternal yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas Polri. Kopolnas memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Misalnya, pada beberapa kasus pelanggaran etika yang melibatkan anggota Polri, masyarakat bisa mengadu langsung ke Kopolnas melalui saluran pengaduan yang disediakan. Kopolnas kemudian menindaklanjuti laporan ini dengan investigasi yang objektif dan transparan.

Pada tahun 2019, Kopolnas menerima laporan tentang dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba. Laporan tersebut kemudian diselidiki oleh Kopolnas, yang bekerja sama dengan Propam Polri (Divisi Profesi dan Pengamanan). Kasus ini mendapat perhatian publik, dan Polri akhirnya mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi kepada anggota yang terlibat. Ini menunjukkan bagaimana pengawasan eksternal yang sehat dapat mendorong Polri untuk melakukan perbaikan dan menjaga integritas.

2. Penggunaan Media Sosial untuk Transparansi

Polri juga mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, memperlihatkan transparansi dalam setiap langkah yang diambil, dan memperkenalkan sistem pengawasan yang ada. Misalnya, Polri seringkali melakukan live streaming saat menggelar operasi atau penggerebekan, serta memberikan update secara langsung kepada

publik tentang perkembangan situasi. Hal ini tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk memantau langsung kinerja Polri, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memberikan masukan atau kritik yang membangun.

Salah satu contoh penggunaan media sosial yang berhasil adalah inisiatif Polri dalam mengedukasi masyarakat melalui akun-akun resmi mereka di platform seperti Instagram dan Twitter. Pada beberapa kasus, Polri mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka terkait penegakan hukum, termasuk meminta pendapat publik mengenai kebijakan-kebijakan terbaru atau langkah-langkah yang diambil oleh aparat. Ini membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka dan memperlancar hubungan antara Polri dan masyarakat.

3. Program Polri Goes to Campus

Program Polri Goes to Campus adalah salah satu contoh lain dari upaya Polri untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat, terutama dengan generasi muda yang sangat terlibat dalam diskusi publik di media sosial. Program ini melibatkan Polri dalam kegiatan berbagi informasi tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparat penegak hukum, serta memberikan edukasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi dengan aparat.

Melalui program ini, Polri tidak hanya berperan sebagai pengayom masyarakat, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung upaya Polri dalam menjaga profesionalisme dan integritas. Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan kritik atau masukan yang dapat membantu Polri dalam meningkatkan kinerjanya.

1.2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Etika oleh Anggota Polri di Era Digital

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku anggota Polri. Di era digital ini, akses terhadap informasi yang begitu cepat dan luas memberikan tantangan tersendiri dalam menjaga etika profesi. Media sosial, misalnya, memberi anggota Polri kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan publik, namun di sisi lain, juga membuka celah untuk penyalahgunaan. Informasi yang tersebar luas di media sosial tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat, tetapi juga dapat menambah tekanan bagi anggota Polri dalam menjaga brand diri dan institusi. Terkadang, keberadaan media sosial membuat individu terjebak dalam godaan untuk mengambil keputusan yang tidak beretika atau bahkan melanggar kode etik, karena bisa mendapatkan perhatian atau pengaruh yang lebih besar dalam jangka pendek. Oleh karena itu, pengaruh media sosial dan teknologi digital sangat signifikan dalam membentuk perilaku anggota Polri, baik secara positif maupun negatif.

Selain itu, ada faktor internal dan eksternal yang turut mendorong terjadinya pelanggaran etika di tubuh Polri. Secara internal, tekanan yang datang dari tugas yang berat dan menuntut kecepatan serta ketepatan dapat menyebabkan kelelahan mental dan emosional. Dalam situasi seperti ini, beberapa anggota Polri mungkin merasa cemas atau tertekan, yang akhirnya memengaruhi keputusan mereka dalam mengambil tindakan. Faktor eksternal juga turut berperan, seperti ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap Polri sebagai penegak hukum yang sempurna. Tuntutan untuk selalu tampil sempurna di mata publik, terutama di dunia maya, bisa menambah beban bagi anggota Polri. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial ini dapat mendorong mereka untuk

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

Dampak tekanan sosial dan budaya yang terjadi di era digital juga tidak bisa diabaikan. Perubahan sosial yang cepat, dengan adanya kecenderungan untuk mengutamakan kecepatan informasi dan reaksi instan, dapat menekan anggota Polri dalam bertindak profesional. Kecenderungan ini sering kali bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang penegak hukum. Tekanan untuk selalu "menciptakan sensasi" atau untuk mendapatkan perhatian cepat di media sosial dapat menyebabkan anggota Polri melupakan nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi landasan tindakan mereka. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas profesionalisme dan integritas yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Untuk lebih memahami bagaimana teknologi digital bisa memengaruhi pelanggaran etika, kita dapat melihat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Misalnya, pelanggaran etika yang melibatkan penyalahgunaan media sosial oleh anggota Polri, seperti penyebaran informasi pribadi atau keterlibatan dalam penyebaran hoaks, dapat merusak reputasi pribadi dan institusi. Dalam beberapa kasus, anggota Polri juga terlibat dalam penggunaan teknologi digital untuk tujuan yang tidak sah, seperti manipulasi data atau pengawasan ilegal, yang jelas bertentangan dengan kode etik. Kasus-kasus seperti ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika digital di kalangan anggota Polri, serta perlunya pembinaan yang berkelanjutan terkait penggunaan teknologi dalam konteks profesional.

Mengatasi masalah pelanggaran etika yang timbul akibat perkembangan teknologi dan media sosial memerlukan peran aktif dari setiap individu dalam Polri, serta dukungan kolektif dari seluruh institusi. Individu harus memiliki kesadaran yang tinggi

terhadap potensi risiko yang bisa ditimbulkan oleh teknologi dan media sosial dalam menjalankan tugasnya. Penguatan etika digital, pelatihan khusus terkait penggunaan teknologi yang etis, dan kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap tindakan di dunia maya sangat diperlukan. Selain itu, institusi Polri juga harus terus berupaya memperkuat pembinaan etika melalui program pelatihan yang relevan dengan tantangan era digital ini, serta meningkatkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan setiap anggota Polri tetap mematuhi kode etik yang ada. Hanya dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan pelanggaran etika yang melibatkan teknologi dapat diminimalkan, dan integritas Polri sebagai penegak hukum dapat terjaga dengan baik.

A. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Etika Anggota Polri

Di era digital yang serba terhubung, media sosial telah menjadi alat yang sangat powerful, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi anggota Polri dalam berinteraksi dengan publik. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memberikan kemudahan bagi anggota Polri untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan membagikan pandangan atau kegiatan mereka dengan masyarakat. Namun, meskipun media sosial menawarkan banyak keuntungan dalam hal komunikasi dan transparansi, ia juga menyimpan potensi besar untuk penyalahgunaan yang dapat merusak citra pribadi anggota Polri dan, lebih luas lagi, reputasi institusi Polri itu sendiri.

Salah satu masalah terbesar yang muncul akibat penggunaan media sosial oleh anggota Polri adalah penyalahgunaan platform ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam beberapa kasus, anggota Polri terlibat dalam perilaku yang melanggar kode etik profesi mereka, seperti penyebaran informasi yang tidak benar,

berbagi data pribadi tanpa izin, atau bahkan berpartisipasi dalam penyebaran hoaks. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan di media sosial bisa mencoreng nama baik Polri, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, dan memperburuk hubungan antara Polri dan publik.

Contoh Kasus Penyalahgunaan Media Sosial

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang terjadi pada 2018, di mana seorang anggota Polri di Medan mengunggah sebuah foto di Instagram yang berisi komentar bernada diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Foto tersebut dengan cepat menjadi viral, memicu kontroversi dan kecaman dari masyarakat. Reaksi cepat dari masyarakat di media sosial memaksa Polri untuk mengambil tindakan disipliner terhadap anggota tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana satu unggahan di media sosial dapat menurunkan reputasi institusi yang diwakili oleh anggota Polri, meskipun tindakan tersebut tidak terjadi dalam konteks tugas resmi mereka.

Contoh lain adalah beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri yang terlibat dalam penyebaran hoaks di media sosial. Dalam salah satu kasus, seorang anggota Polri diduga ikut menyebarkan informasi palsu mengenai situasi politik yang sedang berkembang. Meskipun kemudian terbukti bahwa informasi tersebut tidak akurat, dampaknya sangat besar karena mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap Polri. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap reputasi pribadi maupun institusi Polri.

Media sosial juga memberikan tekanan sosial yang besar terhadap anggota Polri untuk selalu tampil sempurna di mata publik. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terbuka ini, anggota Polri merasa bahwa mereka harus selalu menjaga citra baik dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Tekanan ini sering

kali memicu individu untuk bertindak tidak etis demi mendapatkan perhatian atau pujian, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi pribadi dan integritas institusi.

Tekanan ini dapat menyebabkan anggota Polri merasa terpaksa untuk memperlihatkan kehidupan pribadi mereka yang ideal atau "sempurna", meskipun ini bisa bertentangan dengan kenyataan atau bahkan dengan kode etik profesi mereka. Misalnya, ada anggota Polri yang lebih fokus pada jumlah pengikut atau popularitas di media sosial daripada menjaga sikap profesional yang seharusnya mereka tunjukkan dalam kapasitas mereka sebagai aparat penegak hukum. Hal ini dapat merusak citra Polri sebagai lembaga yang profesional, tegas, dan adil.

Contoh Tekanan Sosial yang Mendorong Tindakan Tidak Etis

Contoh lain yang relevan adalah fenomena "selfie" atau foto diri yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri saat berada di lokasi kejadian atau di sekitar situasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya. Salah satu insiden yang terjadi adalah seorang anggota Polri yang berfoto selfie dengan korban kecelakaan yang sedang tertolong oleh tim medis, kemudian mengunggah foto tersebut ke media sosial. Meskipun anggota Polri tersebut tidak memiliki niat jahat, tindakan ini dianggap tidak etis dan melanggar prinsip privasi serta profesionalisme yang seharusnya dijaga oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini, anggota Polri lebih mementingkan memperoleh perhatian atau mendapatkan "likes" daripada menjaga etika dan privasi korban.

Tindakan semacam ini tidak hanya berisiko merusak citra pribadi anggota Polri, tetapi juga memperburuk hubungan antara Polri dan masyarakat, karena hal ini menciptakan persepsi bahwa Polri lebih mementingkan eksposur pribadi daripada melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan etika. Kejadian semacam ini memperlihatkan bahwa meskipun teknologi

dan media sosial memberikan kemudahan untuk berkomunikasi, mereka juga menghadirkan tantangan dalam menjaga integritas pribadi dan institusi.

Untuk mengatasi masalah ini, Polri perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai penggunaan media sosial oleh anggotanya. Polri harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya tentang pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi di dunia maya. Selain itu, Polri juga perlu memperkenalkan kebijakan yang lebih tegas mengenai pembatasan penggunaan media sosial dalam konteks tugas resmi, serta memberikan sanksi yang jelas bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan media sosial untuk tujuan pribadi atau kelompok.

Polri juga perlu mendorong anggota-anggotanya untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, bukan sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan pribadi. Mengedepankan etika digital dan profesionalisme dalam menggunakan media sosial adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga citra Polri, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri di dunia maya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.

B. Tekanan Eksternal dan Keterbatasan Sumber Daya

Tekanan eksternal dan keterbatasan sumber daya merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan pelanggaran etika oleh anggota Polri, terutama di era digital ini. Kedua faktor ini sering kali saling berkaitan dan dapat menciptakan kondisi yang memaksa anggota Polri untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi mereka.

Masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Polri, terutama terkait dengan transparansi dan penegakan hukum yang adil. Di tengah kemajuan informasi dan keterbukaan yang terjadi di era digital, masyarakat semakin kritis terhadap tindakan

aparatus penegak hukum, terutama Polri. Ekspektasi ini kerap menuntut Polri untuk bertindak cepat dan tegas, namun di sisi lain, keputusan yang terburu-buru atau tidak melalui proses yang matang dapat memicu pelanggaran etika.

Tekanan eksternal ini sangat kuat karena publik, yang kini dapat dengan mudah mengakses informasi melalui media sosial dan berita online, memiliki kekuatan untuk menilai dan mengkritik tindakan Polri. Dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi kerusuhan atau protes besar, Polri sering kali dihadapkan pada tekanan untuk segera merespons dan mengambil tindakan yang dianggap mampu meredakan ketegangan. Namun, di tengah tekanan tersebut, beberapa anggota Polri mungkin merasa terpaksa untuk mengambil jalan pintas atau bertindak di luar batas prosedur yang telah ditetapkan demi memenuhi harapan masyarakat.

Contoh Kasus Tekanan Eksternal:

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan tekanan eksternal terhadap Polri adalah insiden yang terjadi selama protes mahasiswa pada tahun 2019. Ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang (RUU), Polri menghadapi desakan besar untuk segera merespons dengan cepat dan tegas. Di beberapa lokasi, Polri tampak menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam upaya mengendalikan massa. Hal ini memicu kritik tajam dari masyarakat, yang menilai Polri terlalu agresif dan melanggar hak-hak asasi manusia. Tekanan untuk "tampil baik" dan cepat menindak dengan cara yang kuat untuk mengendalikan situasi ini, tanpa melalui prosedur yang sesuai, akhirnya memperburuk citra Polri di mata publik dan memunculkan masalah terkait pelanggaran etika dalam penegakan hukum.

Selain tekanan eksternal, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Polri juga menjadi faktor yang mendorong

pelanggaran etika. Polri sering kali beroperasi dengan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas, sementara tuntutan terhadap mereka untuk menangani berbagai masalah hukum, mulai dari kejahatan terorganisir hingga terorisme, semakin meningkat. Dalam banyak kasus, anggota Polri dihadapkan pada beban kerja yang tinggi, dengan tugas yang sangat banyak dan waktu yang terbatas untuk membuat keputusan yang tepat.

Kelelahan mental dan emosional akibat beban kerja yang tinggi menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan anggota Polri membuat keputusan yang tidak sepenuhnya etis. Dalam situasi darurat atau ketika harus menangani kasus yang memerlukan keputusan cepat, ada kecenderungan bagi beberapa anggota Polri untuk mengambil langkah yang mungkin melanggar prinsip keadilan dan integritas. Terkadang, dalam upaya untuk mencapai hasil yang cepat atau menyelesaikan kasus dengan segera, anggota Polri dapat terjebak dalam penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, atau tindakan kekerasan yang berlebihan.

Contoh Kasus Keterbatasan Sumber Daya:

Contoh lain yang menggambarkan keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum adalah kasus penanganan narkoba yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri sering kali dihadapkan pada situasi yang sangat menantang dalam upaya pemberantasan narkoba. Polri, dengan sumber daya yang terbatas, harus berhadapan dengan jaringan kejahatan internasional yang sangat terorganisir. Dalam kondisi ini, beberapa anggota Polri yang tertekan dengan tugas yang berat, terkadang memilih untuk melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mempermudah penyelesaian kasus. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anggota Polri terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, seperti memanipulasi bukti atau menerima suap dalam

kasus penyelidikan narkoba, karena mereka merasa tidak cukup memiliki dukungan atau sumber daya untuk menangani masalah tersebut secara adil dan transparan.

Selain tekanan eksternal dan keterbatasan sumber daya, ada juga faktor ketidakpastian sosial yang semakin meningkat di masyarakat, yang dapat membuat anggota Polri lebih rentan terhadap pelanggaran etika. Dalam dunia yang terhubung secara digital, anggota Polri sering kali merasa bahwa keputusan mereka akan dinilai oleh publik berdasarkan hasil yang cepat dan terlihat, tanpa mempertimbangkan proses yang benar. Media sosial, yang memuat kritik dan opini masyarakat dalam waktu nyata, sering kali memperburuk situasi ini, menciptakan tekanan sosial bagi anggota Polri untuk tampil sempurna di mata publik.

Tekanan untuk "tampil baik" ini sering kali menciptakan dilema moral bagi anggota Polri, karena mereka harus memutuskan apakah akan bertindak sesuai dengan prosedur yang ada atau memenuhi ekspektasi masyarakat yang menginginkan solusi cepat dan konkret. Dalam beberapa kasus, anggota Polri merasa terjebak dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya adil atau sesuai dengan kode etik mereka.

Sebagai contoh, beberapa anggota Polri di beberapa daerah dilaporkan terlibat dalam tindakan penyalahgunaan kekuasaan selama penggerebekan atau penindakan terhadap kelompok tertentu yang dianggap berbahaya, seperti teroris atau sindikat kejahatan terorganisir. Dalam situasi yang penuh ketegangan, beberapa anggota Polri terpaksa menggunakan kekerasan berlebihan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, tanpa mempertimbangkan prosedur yang benar atau hak asasi manusia. Keputusan ini sering kali dipicu oleh tekanan sosial yang mengharuskan Polri untuk "tampil tegas" dan menunjukkan

kekuatan mereka di mata publik, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap citra institusi dan integritas mereka.

C. Budaya Kekerasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Masyarakat

Budaya kekerasan dalam masyarakat sering kali menjadi faktor yang memengaruhi perilaku etis anggota Polri. Dalam masyarakat yang lebih cenderung menerima tindakan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan sebagai metode untuk mencapai tujuan, anggota Polri bisa terpengaruh oleh norma sosial tersebut. Hal ini dapat menciptakan dilema moral bagi mereka, karena mereka mungkin merasa bahwa menggunakan kekerasan atau bertindak dengan otoritas yang berlebihan adalah cara yang sah untuk menegakkan hukum atau mencapai hasil yang diinginkan. Padahal, tindakan semacam ini sering kali bertentangan dengan kode etik profesi Polri yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam masyarakat yang terbiasa dengan pola interaksi yang keras, baik dalam hubungan keluarga, pekerjaan, atau interaksi sosial lainnya, tindakan kekerasan bisa menjadi hal yang "dalam batas wajar" atau bahkan dianggap sebagai solusi yang sah untuk mengatasi masalah. Misalnya, dalam beberapa budaya atau konteks sosial, kekerasan dianggap sebagai cara untuk menegakkan kekuasaan atau menanggapi ketidakpatuhan. Anggota Polri yang tumbuh dan beroperasi dalam masyarakat seperti ini bisa saja membawa pola pikir tersebut ke dalam tugas profesional mereka, yang berpotensi merusak integritas dan profesionalisme mereka sebagai aparat penegak hukum.

Sebagai bagian dari masyarakat, anggota Polri juga tidak terlepas dari pengaruh budaya yang ada. Jika mereka sering terpapar pada situasi yang penuh kekerasan atau bahkan menyaksikan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah

dalam kehidupan sehari-hari, mereka dapat menginternalisasi pandangan tersebut. Ketika situasi seperti itu muncul dalam penegakan hukum, anggota Polri mungkin merasa bahwa mereka harus menggunakan kekerasan untuk memperoleh kepatuhan atau memberikan efek jera kepada individu yang mereka hadapi, meskipun hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan humanis.

Misalnya, dalam konteks penanganan kerusuhan atau demonstrasi, anggota Polri yang terpapar pada budaya kekerasan mungkin merasa bahwa menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan adalah satu-satunya cara untuk meredakan situasi. Padahal, dengan penerapan metode yang lebih berbasis dialog dan pendekatan yang tidak melibatkan kekerasan, banyak kasus bisa diselesaikan tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan pengaruh budaya kekerasan adalah kasus yang terjadi selama protes mahasiswa di Indonesia, yang seringkali dihadapi dengan respons kekerasan oleh beberapa anggota Polri. Pada tahun 2019, saat protes besar-besaran terjadi terkait dengan RUU yang kontroversial, beberapa insiden menunjukkan anggota Polri menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam merespons massa yang sedang mengadakan aksi damai. Dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, terlihat anggota Polri menggunakan gas air mata dan pemukulan fisik terhadap para demonstran yang tidak melakukan perlawanan fisik.

Penyalahgunaan wewenang ini memunculkan reaksi publik yang keras, dengan banyak pihak mengkritik Polri karena bertindak dengan cara yang melanggar prinsip hak asasi manusia. Meskipun Polri sering kali menghadapi situasi yang penuh tekanan dalam menjaga ketertiban, penggunaan kekerasan berlebihan tidak hanya merusak citra Polri, tetapi juga menciptakan ketegangan

antara Polri dan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Kekerasan dalam Penegakan Hukum: Kasus Pengeroyokan Tahanan

Contoh lainnya adalah kasus kekerasan terhadap tahanan yang sering terjadi dalam penanganan kasus kriminal. Beberapa tahun lalu, sebuah video yang menunjukkan anggota Polri mengeroyok seorang tahanan di dalam ruang tahanan menjadi viral. Kasus tersebut memicu protes luas, karena masyarakat menganggap tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan kode etik Polri yang mengutamakan perlakuan manusiawi terhadap tersangka atau tahanan. Penggunaan kekerasan dalam situasi tersebut memperburuk pandangan masyarakat terhadap integritas Polri, memperburuk citra lembaga, dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan publik.

Kekerasan semacam ini lebih sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki budaya yang lebih toleran terhadap kekerasan sebagai solusi atas ketidakpatuhan. Pada titik ini, anggota Polri yang terpapar pada budaya semacam ini bisa cenderung merespons dengan cara yang sama, bahkan dalam situasi yang tidak memerlukan tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya kekerasan dalam masyarakat dapat langsung memengaruhi cara anggota Polri bertindak dalam penegakan hukum.

Budaya kekerasan yang ada dalam masyarakat juga berpotensi memengaruhi kualitas penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika kekerasan dianggap sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan masalah, akan ada kecenderungan untuk mengabaikan pendekatan yang lebih adil, berbasis hak asasi manusia, dan humanis. Dalam jangka panjang, budaya semacam ini

dapat merusak integritas Polri sebagai institusi yang harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang diambil.

Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi Polri untuk melakukan reformasi dalam pendekatannya terhadap penegakan hukum, dengan mengedepankan pelatihan yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani situasi yang penuh ketegangan. Program pelatihan etika yang fokus pada pengurangan penggunaan kekerasan dan penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dapat membantu mengurangi perilaku kekerasan yang tidak perlu dan memperbaiki hubungan Polri dengan masyarakat.

Langkah pertama dalam mencegah pengaruh budaya kekerasan terhadap Polri adalah melalui pembinaan dan pendidikan etika yang berkelanjutan. Anggota Polri perlu dilatih untuk memahami bahwa tindakan kekerasan hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir dan hanya dalam situasi yang benar-benar memerlukan. Pendidikan mengenai penegakan hukum yang adil, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari pelatihan Polri, baik pada tahap rekrutmen awal maupun pelatihan berkelanjutan.

Selain itu, penting juga untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindakan kekerasan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar kode etik. Dengan demikian, Polri dapat memperkuat citra mereka sebagai lembaga yang profesional, berintegritas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

D. Kurangnya Pembinaan Etika yang Kontinu

Kurangnya pembinaan etika yang berkelanjutan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pelanggaran

etika di Polri. Pembinaan etika harus dilakukan secara rutin dan terintegrasi, agar anggota Polri tidak hanya memahami aspek teknis hukum, tetapi juga memiliki dasar moral yang kuat dalam bertindak. Tanpa adanya pembinaan yang efektif, anggota Polri bisa kehilangan pemahaman tentang pentingnya bertindak dengan integritas dalam setiap situasi.

Salah satu aspek penting dalam pembinaan etika adalah melibatkan pelatihan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, seperti etika penggunaan media sosial, cara menangani informasi digital, serta menjaga privasi. Mengingat media sosial dan teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka pembinaan etika Polri harus terus berkembang untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman.

E. Ketidakjelasan atau Tidak Tepatnya Kebijakan Internal

Ketidakjelasan atau kurangnya ketepatan dalam kebijakan internal Polri sering kali menjadi faktor penyebab pelanggaran etika oleh anggotanya. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri seharusnya memiliki pedoman dan kebijakan yang jelas mengenai batasan-batasan perilaku yang dapat diterima, baik dalam tugas sehari-hari maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan yang ada tidak cukup tegas atau tidak mengatur secara rinci tentang tindakan yang dianggap melanggar etika, menciptakan celah bagi anggota Polri untuk bertindak tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

Ketidakjelasan ini, baik dalam hal prosedur operasional standar (SOP) atau kebijakan internal yang lebih umum, bisa menyebabkan kebingungan dan ketidaktauhan di kalangan anggota Polri mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan dalam situasi tertentu. Ketika aturan yang ada tidak jelas atau tidak memberikan pedoman yang cukup mengenai perilaku yang diharapkan, anggota Polri mungkin merasa bahwa mereka tidak

akan dihukum atau diadili dengan adil atas tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran etika yang berulang, karena tidak ada kejelasan atau ketegasan dalam kebijakan untuk mencegahnya.

Selain itu, jika kebijakan internal tidak ditegakkan dengan ketat atau tidak disertai dengan pengawasan yang efektif, anggota Polri bisa merasa bahwa mereka dapat melakukan penyimpangan tanpa takut akan konsekuensi. Ini terutama berlaku dalam situasi yang penuh tekanan atau dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan keputusan cepat. Tanpa adanya pengawasan yang cukup, anggota Polri dapat merasa bebas untuk melanggar aturan atau bertindak secara tidak etis, karena mereka tidak merasa ada risiko yang berarti bagi mereka.

Sistem pengawasan internal yang lemah atau tidak berjalan dengan efektif dapat mengurangi kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Jika pengawasan tidak cukup ketat, anggota Polri mungkin merasa bahwa mereka tidak akan diawasi secara maksimal, yang pada gilirannya dapat memudahkan mereka untuk melakukan penyimpangan etika, terutama ketika mereka merasa bahwa tindakan mereka tidak akan terdeteksi atau tidak akan dihukum.

Kurangnya pengawasan yang efektif sering kali terjadi karena masalah birokrasi, kurangnya sumber daya untuk melakukan evaluasi dan audit secara rutin, atau karena adanya konflik kepentingan internal yang menghalangi proses pengawasan yang objektif. Dalam beberapa kasus, anggota Polri mungkin merasa bahwa mereka dapat bertindak dengan cara yang tidak etis atau melanggar prosedur, karena mereka yakin tidak ada pihak yang akan mengawasi atau menindaklanjuti tindakan tersebut. Situasi ini menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk

menjaga profesionalisme dan integritas, yang pada akhirnya merusak citra Polri di mata publik.

Salah satu contoh nyata yang menggambarkan pengaruh ketidakjelasan kebijakan internal terhadap pelanggaran etika adalah kasus yang melibatkan penggunaan senjata api oleh anggota Polri. Pada beberapa kasus, anggota Polri yang terlibat dalam insiden kekerasan menggunakan senjata api, meskipun dalam situasi tersebut tidak ada ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Kasus ini muncul karena adanya kebijakan yang tidak cukup jelas dalam mengatur prosedur penggunaan senjata api dalam situasi tertentu, yang menyebabkan anggota Polri salah tafsir atau merasa tertekan untuk menggunakan senjata meskipun tidak diperlukan.

Contoh lainnya adalah kasus yang melibatkan penanganan narkoba di Polri. Beberapa tahun lalu, terdapat laporan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan barang bukti narkoba. Beberapa anggota Polri terlibat dalam manipulasi bukti atau penyalahgunaan barang bukti untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kasus ini terjadi karena kebijakan internal mengenai pengelolaan barang bukti tidak cukup rinci, dan sistem pengawasan internal yang lemah memungkinkan anggota Polri untuk mengambil keuntungan dari celah yang ada. Meskipun kebijakan mengenai pengelolaan barang bukti sudah ada, namun ketidaktegasan dalam pengawasan dan kurangnya kontrol terhadap prosedur operasional standar menyebabkan pelanggaran etika ini terjadi.

Salah satu contoh lain adalah kasus yang terjadi pada unit pengamanan di Polri, di mana beberapa anggota Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan tahanan terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan kekerasan terhadap tahanan. Dalam kasus ini, ketidakjelasan kebijakan mengenai prosedur pengamanan tahanan dan kurangnya pengawasan terhadap

petugas yang bertanggung jawab menciptakan celah bagi beberapa anggota untuk bertindak secara tidak etis. Beberapa petugas yang tidak diawasi dengan ketat merasa bebas untuk melakukan kekerasan terhadap tahanan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan etika profesi Polri.

Pengawasan yang lemah juga tercermin dalam adanya praktik kolusi dan suap dalam beberapa kasus, di mana anggota Polri terlibat dalam korupsi atau menerima suap dari pihak yang terlibat dalam penyelidikan atau penegakan hukum. Kurangnya evaluasi yang rutin terhadap kinerja dan perilaku anggota Polri memudahkan praktik-praktik tersebut berlangsung tanpa terdeteksi atau tanpa mendapat sanksi yang layak.

Solusi untuk Memperbaiki Kebijakan dan Pengawasan Internal:

Untuk mengatasi masalah ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam kebijakan internal, Polri perlu memperbarui dan merinci kebijakan-kebijakan yang ada. Kebijakan yang jelas dan tegas mengenai prosedur, batasan perilaku, dan tindakan yang diizinkan dalam penegakan hukum harus diterapkan dengan rinci dan disosialisasikan secara menyeluruh kepada semua anggota. Hal ini penting agar setiap anggota Polri memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, Polri harus memperkuat sistem pengawasan internal dengan memastikan bahwa setiap tindakan anggota Polri, terutama yang berisiko tinggi untuk menimbulkan pelanggaran etika, diawasi dengan ketat. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan melibatkan tim yang independen untuk melakukan audit rutin, serta menerapkan sistem pelaporan yang aman dan transparan bagi masyarakat maupun anggota Polri itu sendiri. Proses ini akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan etika yang dilakukan oleh anggota Polri.

1.3. Faktor Sistemik dan Sosial dalam Polri

Dalam struktur organisasi Polri, faktor sistemik dan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku anggotanya. Salah satu karakteristik yang paling mencolok adalah budaya hierarki yang ketat dan ekspektasi tinggi terhadap loyalitas terhadap atasan dan rekan sejawat. Budaya ini, meskipun memiliki tujuan untuk menciptakan kedisiplinan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas, kadang-kadang bisa menjadi pedang bermata dua. Dalam beberapa situasi, anggota Polri bisa merasa tertekan untuk mengikuti perintah atau kebijakan yang, meskipun secara formal mungkin diperintahkan oleh atasan, tidak selalu sesuai dengan prinsip moral dan etika yang seharusnya dijunjung tinggi. Tekanan semacam ini sering kali muncul dari rasa takut akan konsekuensi negatif seperti penurunan pangkat, bahkan isolasi sosial dalam tubuh institusi, yang bisa berujung pada keputusan-keputusan yang bertentangan dengan kode etik profesi mereka.

Perubahan zaman yang semakin pesat, terutama dengan hadirnya era digital dan kebebasan informasi yang semakin terbuka, memperburuk tantangan ini. Kini, setiap tindakan anggota Polri, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat dengan mudah dipantau dan dinilai oleh masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas untuk menilai kinerja dan integritas Polri, serta menuntut transparansi dalam setiap tindakan yang diambil oleh institusi ini. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi anggota Polri untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat yang semakin tinggi. Namun, jika anggota Polri merasa bahwa sistem dalam institusi mereka tidak cukup mendukung perilaku yang etis atau tidak memberikan ruang untuk berdiskusi secara terbuka mengenai isu-isu moral, hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang seharusnya dijaga.

Penting bagi setiap elemen masyarakat untuk memahami bahwa membangun budaya etika yang kuat di dalam Polri bukanlah tugas yang mudah. Ini bukan hanya tanggung jawab institusi semata, tetapi juga bagian dari kolaborasi bersama antara Polri dan masyarakat. Pendidikan etika yang berkelanjutan dan sistem pengawasan yang efektif di dalam Polri perlu terus diperkuat agar setiap anggota Polri mampu bertindak dengan integritas tinggi, tanpa terpengaruh oleh tekanan yang datang dari struktur hierarki maupun ekspektasi sosial yang bisa saja tidak sesuai dengan prinsip moral yang benar. Masyarakat, sebagai mitra dalam penegakan hukum, juga harus mendukung Polri dengan memberikan umpan balik konstruktif, serta memahami tantangan yang dihadapi oleh anggota Polri dalam menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada atasan, tugas profesional, dan nilai-nilai etika yang berlaku. Dengan pendekatan yang saling mendukung ini, diharapkan integritas Polri dapat terus terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ini semakin kuat.

1.4. Pentingnya Pendidikan Etika dalam Pembinaan Polri untuk Meningkatkan Integritas

Pendidikan etika memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan anggota Polri untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Tujuan utama dari pendidikan etika adalah untuk membentuk karakter anggota Polri yang tidak hanya terampil dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki kepribadian yang berintegritas tinggi, mampu membuat keputusan yang adil, dan selalu bertindak sesuai dengan kode etik profesi. Pendidikan etika membantu anggota Polri untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang harus mereka pegang dalam setiap tindakan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal atau kepentingan pribadi.

Melalui pendidikan etika, anggota Polri juga diberi bekal untuk menghadapi situasi yang kompleks dan seringkali ambigu, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan moralitas.

Program pendidikan etika yang efektif di Polri harus dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kode etik dan nilai-nilai dasar yang harus dijaga oleh setiap anggota. Program ini perlu mencakup tidak hanya aspek teori, tetapi juga pelatihan praktis yang memungkinkan anggota Polri untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin memicu pelanggaran etika. Program ini harus terus diperbarui agar relevan dengan tantangan zaman, terutama dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial yang membawa dampak besar terhadap cara Polri berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pelatihan etika yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan berbagai tingkatan dalam Polri, mulai dari pendidikan dasar hingga pelatihan berkelanjutan, agar setiap anggota memiliki pemahaman yang konsisten dan mendalam mengenai pentingnya integritas dalam setiap tindakan mereka.

Pentingnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan dalam meningkatkan etika anggota Polri tidak bisa dianggap sepele. Mengingat sifat pekerjaan yang penuh tantangan dan seringkali melibatkan situasi yang penuh tekanan, anggota Polri perlu memiliki ruang untuk merefleksikan tindakannya dan terus memperbaiki diri. Pembinaan berkelanjutan ini mencakup evaluasi dan pemantauan terhadap perilaku anggota Polri, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat pemahaman etika. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, anggota Polri dapat terus mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang.

Pengaruh pendidikan etika terhadap sikap dan perilaku anggota Polri sangat signifikan. Ketika anggota Polri memahami

dengan baik pentingnya etika dalam pekerjaan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral yang benar dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pendidikan etika ini akan membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih profesional, mencegah mereka terjebak dalam godaan atau situasi yang dapat merusak integritas mereka. Selain itu, pendidikan etika yang efektif juga dapat mengurangi potensi pelanggaran etika yang terjadi di dalam tubuh Polri, karena anggota Polri akan memiliki landasan yang kuat untuk menilai dan menghadapi situasi yang mungkin membahayakan kredibilitas mereka.

Studi tentang keberhasilan program pendidikan etika di lembaga-lembaga lain memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana pembinaan etika yang tepat dapat membawa dampak positif. Beberapa lembaga penegak hukum di negara lain telah berhasil menerapkan program pendidikan etika yang mengintegrasikan teori dengan praktik, serta memberi ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman dan belajar dari kasus-kasus nyata. Misalnya, di beberapa negara, pelatihan etika melibatkan simulasi situasi yang memungkinkan anggota untuk membuat keputusan etis dalam waktu nyata. Keberhasilan program-program seperti ini dapat menjadi referensi yang berharga untuk Polri, dengan menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan lokal. Dengan mengadopsi pendekatan yang serupa, Polri dapat memperkuat integritas dan profesionalisme anggotanya, sehingga semakin mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum ini.

A. Pendidikan Etika Sebagai Pilar Penguatan Karakter Anggota Polri

Pendidikan etika di Polri lebih dari sekadar pengajaran tentang peraturan hukum dan prosedur operasional. Ia berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan karakter setiap anggota Polri

yang kuat, yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang universal. Dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan, seperti penegakan hukum, integritas pribadi menjadi faktor penentu yang tidak hanya memengaruhi kualitas keputusan yang diambil, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kejujuran, dan profesionalisme. Pendidikan etika yang baik akan menciptakan anggota Polri yang mampu mengambil keputusan yang adil dan tepat, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan atau godaan.

Anggota Polri yang memiliki pemahaman yang kuat tentang etika tidak hanya mampu membedakan mana yang benar dan salah dalam konteks hukum, tetapi juga memahami nilai-nilai yang lebih besar yang harus dipegang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka akan tahu kapan dan bagaimana mereka harus mengedepankan keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak populer atau sulit dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam konteks ini, integritas pribadi mereka akan menjadi panduan utama dalam menjalankan tugas, dan pendidikan etika akan menjadi alat yang efektif untuk mengembangkan karakter yang teguh dan bermoral.

Pembinaan karakter etika dalam Polri harus dimulai sejak pendidikan dasar, yaitu ketika calon anggota Polri pertama kali memasuki pendidikan. Pada tahap ini, fokus utama adalah pada pemahaman nilai-nilai dasar etika dan moral yang akan membentuk sikap dan perilaku anggota Polri di masa depan. Pendidikan etika tidak cukup hanya dengan memberikan pengetahuan tentang aturan yang tertulis atau prosedur yang harus diikuti, tetapi juga harus mengajarkan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pelatihan etika dasar ini bertujuan untuk memberikan anggota Polri pemahaman yang mendalam tentang peran mereka sebagai penjaga keadilan, bukan hanya sebagai aparat penegak

hukum yang menjalankan perintah. Mereka harus memahami bahwa tugas mereka lebih dari sekadar menegakkan hukum, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral yang besar terhadap masyarakat yang dilindungi oleh hukum tersebut. Oleh karena itu, setiap calon anggota Polri harus didorong untuk mengembangkan sikap empati, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi, karena mereka akan berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang dan pandangan.

Namun, pembinaan etika tidak berhenti pada pendidikan dasar. Pembinaan ini harus terus diperkuat sepanjang karir anggota Polri melalui pelatihan dan evaluasi berkelanjutan. Pendidikan etika berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap konsisten dalam menjaga integritasnya, meskipun mereka mungkin dihadapkan pada tantangan dan tekanan yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Pelatihan berkelanjutan dapat mencakup berbagai hal, mulai dari kasus-kasus etika yang aktual dan relevan, hingga simulasi situasi yang menguji kemampuan anggota Polri dalam membuat keputusan yang etis.

Pelatihan berkelanjutan juga dapat mencakup aspek-aspek penting seperti pengelolaan stres, pengambilan keputusan yang etis dalam situasi darurat, serta pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat dengan sikap yang profesional dan adil. Di sini, anggota Polri tidak hanya dilatih untuk menjadi terampil dalam hal teknis, tetapi juga untuk membangun kesadaran yang lebih besar mengenai bagaimana perilaku mereka memengaruhi masyarakat dan citra Polri sebagai institusi.

Selain itu, dengan adanya pelatihan berkelanjutan, anggota Polri dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, termasuk perubahan sosial, politik, dan teknologi yang bisa mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas. Pelatihan ini akan memastikan bahwa mereka tidak hanya mampu menjalankan

tugas dengan benar, tetapi juga dapat beradaptasi dengan dinamika zaman yang terus berkembang, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip etika.

Pendidikan etika dalam Polri seharusnya tidak hanya terbatas pada pemahaman mengenai peraturan tertulis atau SOP yang mengatur tugas dan kewajiban anggota. Lebih dari itu, pendidikan etika harus mencakup pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana etika itu diterapkan dalam situasi nyata, termasuk tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, etika mengajarkan anggota Polri untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang mereka buat, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial.

Misalnya, anggota Polri yang memiliki pendidikan etika yang baik akan mampu menangani situasi yang penuh tekanan, seperti demonstrasi atau kerusuhan, dengan bijaksana dan adil, tanpa terjebak dalam penggunaan kekerasan yang tidak perlu. Mereka akan memahami pentingnya transparansi, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap langkah yang mereka ambil, sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, pendidikan etika yang solid akan membekali anggota Polri dengan sikap yang tepat dalam menghadapi dilema moral yang sering muncul dalam tugas mereka.

Beberapa nilai yang perlu diajarkan dalam pendidikan etika Polri antara lain:

1. Tanggung Jawab

Anggota Polri harus sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat, baik dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, maupun dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penegakan hukum yang adil, tetapi juga pada bagaimana

mereka berperilaku dan bersikap dalam setiap aspek kehidupan mereka.

2. Kesadaran Sosial

Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri harus peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Mereka harus memahami bahwa mereka berinteraksi dengan beragam individu dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan etika harus menekankan pentingnya sikap empati, keterbukaan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

3. Komitmen terhadap Keadilan

Komitmen terhadap keadilan adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri. Pendidikan etika dalam Polri harus mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya tentang menjalankan hukum secara kaku, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum.

4. Kejujuran dan Transparansi

Anggota Polri harus selalu menjaga integritas pribadi dengan berpegang pada prinsip kejujuran dan transparansi, baik dalam tugas maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Pendidikan etika harus mengajarkan pentingnya menjadi teladan yang baik, baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat maupun dalam menjalankan tugas sehari-hari.

B. Menghadapi Tantangan Profesionalisme di Era Digital

Pendidikan etika semakin relevan dan penting di era digital ini, di mana kemajuan teknologi dan media sosial telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk cara kita berinteraksi,

berkomunikasi, dan menilai tindakan seseorang. Era digital menghadirkan tantangan baru bagi anggota Polri dalam menjaga profesionalisme dan integritas, karena berbagai informasi dapat dengan mudah tersebar luas, baik yang positif maupun negatif. Dalam konteks ini, anggota Polri dituntut untuk tidak hanya menjaga perilaku etis di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya, karena apa yang mereka lakukan di media sosial atau platform digital lainnya dapat berdampak langsung pada citra mereka dan institusi Polri secara keseluruhan.

Di dunia yang semakin terhubung ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi atau hiburan, tetapi juga menjadi alat yang sangat kuat untuk membentuk opini publik. Setiap unggahan, komentar, atau foto yang dibagikan oleh anggota Polri di platform media sosial dapat dengan cepat tersebar dan dinilai oleh publik, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, pendidikan etika digital menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa anggota Polri dapat menjaga citra pribadi dan institusi mereka, sambil tetap bertindak dengan integritas yang tinggi.

Anggota Polri harus diajarkan untuk memahami dampak dari setiap tindakan mereka di dunia maya, serta bagaimana membedakan antara perilaku pribadi dan profesional dalam penggunaan media sosial. Mereka perlu dilatih untuk memahami bahwa meskipun media sosial memberikan kebebasan berekspresi, kebebasan ini harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, terutama karena mereka mengenakan seragam negara yang membawa kewajiban untuk menjadi teladan bagi masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh anggota Polri di era digital adalah penyalahgunaan media sosial. Dalam beberapa kasus, anggota Polri terlibat dalam tindakan yang tidak etis di media sosial, seperti berbagi informasi pribadi tanpa izin, mengungkapkan pandangan pribadi yang kontroversial, atau

bahkan terlibat dalam penyebaran hoaks. Perilaku semacam ini dapat merusak reputasi pribadi anggota Polri dan mencoreng citra Polri secara keseluruhan. Sebagai contoh, anggota Polri yang mengunggah foto atau video terkait operasi atau kegiatan yang sedang dilakukan bisa berisiko melanggar privasi individu atau mengungkapkan informasi sensitif yang seharusnya tidak diketahui publik.

Lebih jauh lagi, keterlibatan anggota Polri dalam penyebaran hoaks atau berita palsu dapat memperburuk situasi, karena hoaks dapat menyebabkan kegaduhan dan kebingungan di masyarakat. Dalam beberapa kasus, anggota Polri yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial bisa terjebak dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan ikut terlibat dalam diskusi yang bersifat provokatif. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Polri dan membuat institusi penegak hukum ini terlihat tidak profesional di mata publik.

Pendidikan etika digital untuk Polri harus mencakup pengenalan tentang etika penggunaan media sosial dan teknologi secara umum. Anggota Polri harus dibekali dengan pemahaman yang jelas mengenai batasan-batasan yang perlu dijaga saat berinteraksi di dunia maya. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diajarkan dalam pendidikan etika digital:

1. Penggunaan Media Sosial yang Profesional

Anggota Polri harus diajarkan untuk menggunakan media sosial dengan cara yang profesional, tidak mengungkapkan pandangan pribadi yang kontroversial atau membagikan informasi yang dapat merusak citra mereka dan institusi. Mereka harus memahami bahwa mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga lembaga yang mereka wakili.

2. Pentingnya Privasi dan Keamanan Informasi

Anggota Polri perlu memahami bahwa informasi pribadi dan sensitif harus dijaga kerahasiaannya, baik itu berkaitan dengan individu, keluarga, ataupun institusi Polri. Pendidikan ini penting untuk mencegah penyebaran informasi pribadi tanpa izin, yang bisa berpotensi menimbulkan masalah hukum dan etis.

3. Membedakan antara Informasi Pribadi dan Profesional

Anggota Polri perlu diajarkan untuk memisahkan dengan jelas antara kehidupan pribadi dan profesional di dunia maya. Ini termasuk menjaga agar pandangan pribadi tidak tercampur dengan sikap profesional yang harus ditunjukkan sebagai bagian dari Polri.

4. Penanganan Hoaks dan Informasi Palsu

Sebagai bagian dari pelatihan etika digital, anggota Polri harus dilatih untuk mengenali hoaks dan berita palsu yang dapat tersebar di media sosial. Mereka harus mengetahui cara-cara untuk memverifikasi informasi dan memahami pentingnya tidak terlibat dalam penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

5. Kewajiban untuk Menjadi Teladan

Anggota Polri harus diberi pemahaman bahwa mereka adalah teladan bagi masyarakat, sehingga perilaku mereka di dunia maya juga harus mencerminkan profesionalisme dan integritas. Setiap interaksi online mereka, baik itu dalam bentuk komentar, unggahan, atau pesan langsung, harus dilakukan dengan memperhatikan etika yang baik dan tidak merusak citra Polri.

Di era digital, kecepatan penyebaran informasi sangat tinggi, dan ini membawa tantangan besar bagi Polri dalam menjaga integritas dan reputasi. Dalam menghadapi tantangan ini, pengawasan yang ketat terhadap perilaku anggota Polri di media sosial menjadi hal yang penting. Polri perlu mengimplementasikan

kebijakan yang jelas dan tegas terkait penggunaan media sosial oleh anggotanya, termasuk memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Selain itu, Polri juga dapat mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan jika mereka melihat perilaku tidak etis atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri di dunia maya. Pengawasan yang efektif dan sistem pelaporan ini akan membantu menjaga kualitas profesionalisme Polri dalam menghadapi tantangan di era digital.

Beberapa tahun lalu, terjadi sebuah insiden di mana seorang anggota Polri di media sosial mengunggah gambar yang bersifat diskriminatif dan tidak profesional terhadap kelompok tertentu. Unggahan tersebut dengan cepat tersebar luas dan mendapat kecaman dari masyarakat. Polri segera merespons dengan melakukan penyelidikan terhadap anggota yang bersangkutan, dan tindakan disipliner diberikan sebagai bentuk sanksi. Kasus ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang etika digital, karena tindakan satu individu bisa merusak citra Polri secara keseluruhan.

Kasus lainnya adalah ketika beberapa anggota Polri terlibat dalam penyebaran informasi palsu yang meresahkan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penting bagi anggota Polri untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang dampak dari setiap informasi yang mereka bagikan. Dengan adanya pelatihan etika digital yang tepat, anggota Polri akan lebih mampu menghindari terlibat dalam penyebaran hoaks dan lebih berhati-hati dalam bertindak.

C. Pembinaan Etika yang Terus-Menerus untuk Menghindari Pelanggaran

Pendidikan etika di Polri harus diterapkan secara berkelanjutan dan tidak terbatas pada satu kali pelatihan atau pendidikan dasar saja. Tugas penegakan hukum yang penuh

tekanan membutuhkan kesadaran moral yang konsisten. Oleh karena itu, pembinaan etika harus dilaksanakan dalam berbagai bentuk, mulai dari pelatihan reguler, kegiatan pengembangan diri, hingga evaluasi kinerja yang melibatkan aspek moral dan etika. Pendekatan yang terus-menerus akan membantu anggota Polri untuk menjaga nilai-nilai etika dalam setiap tahap perjalanan karir mereka.

Pelatihan berkelanjutan ini sangat penting untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan anggota Polri, mengingat situasi dan tantangan dalam masyarakat terus berkembang. Dalam pembinaan berkelanjutan ini, anggota Polri tidak hanya dilatih untuk memahami aturan, tetapi juga didorong untuk lebih reflektif dalam menghadapi tantangan etis di lapangan. Hal ini dapat membantu mereka untuk tidak hanya menghindari pelanggaran etika, tetapi juga untuk menciptakan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel.

D. Membentuk Pemimpin yang Berintegritas

Salah satu dampak jangka panjang dari pendidikan etika yang efektif adalah terbentuknya pemimpin Polri yang berintegritas tinggi. Pemimpin yang berintegritas memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai etika dan moralitas, serta mampu memberikan teladan yang baik bagi anggotanya. Pemimpin seperti ini bukan hanya dilihat sebagai figur otoriter yang mengeluarkan perintah, tetapi juga sebagai panutan yang mengarahkan anggotanya untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar. Dalam konteks Polri, pemimpin yang berintegritas menjadi kunci untuk menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi moralitas dan profesionalisme, serta mampu mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pendidikan etika yang baik tidak hanya berfokus pada pembentukan individu, tetapi juga pada penciptaan pemimpin

yang dapat membawa perubahan positif dalam institusi. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi mampu menegakkan aturan dan etika dengan konsisten, memberikan contoh yang baik dalam setiap tindakannya, dan menjadi teladan bagi anggotanya. Pemimpin yang berintegritas akan selalu memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme adalah hal yang harus dijunjung tinggi, baik di dalam maupun di luar tugas mereka.

Pemimpin yang berintegritas akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang benar, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan atau ketika dihadapkan pada konflik kepentingan. Dalam dunia yang penuh tantangan dan godaan seperti saat ini, kemampuan untuk tetap berpegang pada prinsip moral yang kuat adalah hal yang sangat penting. Misalnya, seorang pemimpin Polri yang dihadapkan pada situasi di mana keputusan yang diambil bisa menguntungkan dirinya atau koleganya, tetapi bertentangan dengan nilai keadilan, akan memilih untuk bertindak sesuai dengan moralitas yang benar, meskipun itu mungkin akan mengorbankan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemimpin yang berintegritas juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang adil dan objektif meskipun mereka berada di bawah tekanan besar. Sebagai contoh, dalam situasi yang penuh konflik atau ketika dihadapkan pada masalah yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda, seorang pemimpin yang berintegritas akan memprioritaskan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan, alih-alih mempertimbangkan faktor pribadi atau kelompok tertentu. Keputusan-keputusan yang diambil dengan landasan moral yang kuat akan lebih dihargai oleh anggota Polri dan masyarakat, serta memperkuat kredibilitas pemimpin itu sendiri dan institusi yang dipimpinnya.

Penting juga untuk dicatat bahwa dalam situasi krisis atau situasi yang penuh ketegangan, pemimpin yang berintegritas akan

menenangkan situasi dengan pendekatan yang berbasis pada dialog dan solusi yang etis, bukan dengan cara-cara yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Mereka menghindari langkah-langkah yang dapat merusak citra institusi, seperti menggunakan kekerasan berlebihan atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Pemimpin yang berintegritas juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang etis dan aman bagi setiap anggota Polri. Mereka harus memastikan bahwa di bawah kepemimpinan mereka, semua anggota merasa dihargai, diperlakukan secara adil, dan memiliki ruang untuk berkembang dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang berintegritas akan mendukung prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek operasional, mulai dari perekrutan anggota, penempatan jabatan, hingga pemberian sanksi atas pelanggaran etika.

Lingkungan kerja yang etis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri merasa dihargai dan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan profesionalisme. Jika anggota Polri merasa bahwa pemimpin mereka berkomitmen terhadap etika, mereka akan lebih terdorong untuk meniru perilaku tersebut dalam tugas sehari-hari. Selain itu, pemimpin yang berintegritas akan selalu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua keputusan yang diambil.

Pemimpin Polri yang memiliki integritas juga berperan besar dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Masyarakat cenderung menilai Polri berdasarkan sikap dan perilaku para pemimpin mereka. Pemimpin yang berintegritas akan mampu membangun hubungan yang lebih baik antara Polri dan masyarakat, karena mereka akan dianggap sebagai figur yang dapat dipercaya, adil, dan transparan. Kepercayaan masyarakat

terhadap Polri sangat bergantung pada contoh yang diberikan oleh para pemimpin, dan pemimpin yang berintegritas akan selalu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh institusi adalah untuk kepentingan masyarakat dan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Sebagai contoh, ketika masyarakat merasa bahwa Polri menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap institusi ini akan semakin kuat. Pemimpin yang berintegritas akan selalu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Polri tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Pemimpin yang berintegritas juga memainkan peran kunci dalam memotivasi dan mengembangkan potensi anggota Polri. Pemimpin yang menunjukkan keteladanan dalam menjaga integritas akan menciptakan iklim yang mendukung anggota untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip etika dan profesionalisme. Mereka akan mendorong setiap anggota Polri untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin yang memiliki integritas tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga memberikan ruang bagi anggota untuk berbicara, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih etis dalam penegakan hukum.

Penting juga bagi pemimpin untuk mengakui dan memberi penghargaan kepada anggota yang menunjukkan sikap profesional dan berintegritas, sehingga mereka merasa dihargai atas upaya mereka menjaga etika dalam pekerjaan mereka. Dengan cara ini, pemimpin tidak hanya memotivasi anggota untuk bertindak dengan baik, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang mengedepankan keadilan dan etika sebagai nilai dasar dalam setiap tindakan.

E. Peran Pendidikan Etika dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik terhadap Polri merupakan salah satu aset terpenting yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini sangat bergantung pada perilaku etis yang ditunjukkan oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka. Ketika masyarakat merasa bahwa Polri mengedepankan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasional mereka, baik dalam penegakan hukum, pemberian pelayanan, maupun dalam interaksi dengan masyarakat, kepercayaan terhadap institusi ini akan semakin kuat. Oleh karena itu, pendidikan etika memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun hubungan yang harmonis, transparan, dan saling menghargai antara Polri dan publik.

Pendidikan etika yang efektif akan membekali anggota Polri dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya menjaga integritas dalam setiap keputusan dan tindakan mereka. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, anggota Polri perlu memiliki landasan moral yang kokoh untuk menghadapi berbagai situasi yang sulit dan penuh tekanan. Pendidikan etika mengajarkan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya harus benar dari sisi hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan transparansi. Dengan pendidikan etika yang kuat, anggota Polri akan lebih siap untuk menjaga standar moral tinggi dalam setiap tindakan mereka, bahkan ketika menghadapi godaan atau situasi yang dapat menggoda mereka untuk bertindak tidak etis.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan etika adalah pemahaman bahwa setiap anggota Polri adalah perwakilan dari institusi yang lebih besar, yaitu Polri itu sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri akan dievaluasi oleh masyarakat, dan ini memiliki dampak langsung terhadap citra dan reputasi Polri. Oleh karena itu, anggota Polri harus dilatih untuk

memahami bahwa menjaga integritas pribadi bukan hanya penting untuk karier mereka, tetapi juga untuk memperkuat citra Polri sebagai lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya dan dihormati.

Pendidikan etika yang komprehensif juga berperan besar dalam membangun relasi yang sehat dan harmonis antara Polri dan masyarakat. Ketika anggota Polri memahami pentingnya menghormati hak-hak individu dan bertindak dengan adil, mereka akan lebih mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang penuh rasa hormat dan empati. Ini akan menciptakan kepercayaan di antara masyarakat bahwa Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi Polri adalah terciptanya jarak atau ketegangan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Ketegangan ini sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan atau ketidakadilan dalam interaksi. Namun, dengan pendidikan etika yang menekankan pada pentingnya transparansi, keadilan, dan keterbukaan, anggota Polri dapat menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih responsif dalam menangani berbagai masalah yang muncul. Dengan memperlakukan masyarakat dengan hormat, menghargai hak asasi manusia, dan bertindak dengan transparansi, Polri dapat memperkuat hubungan mereka dengan publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini.

Salah satu tujuan utama pendidikan etika di Polri adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat akan merasa lebih dihargai dan diperlakukan secara adil jika mereka merasakan adanya profesionalisme dan etika dalam setiap interaksi mereka dengan anggota Polri. Anggota Polri yang memahami dan menghayati nilai-nilai etika akan lebih menghargai setiap individu

yang mereka layani, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Dalam hal ini, pendidikan etika dapat membantu menciptakan budaya pelayanan yang responsif, adil, dan penuh empati.

Kepercayaan publik yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Polri akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan aman dalam berinteraksi dengan aparat penegak hukum. Mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan bekerja sama dengan Polri dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan adanya ketidakadilan, diskriminasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan Polri, kepercayaan terhadap institusi ini akan menurun, yang dapat berdampak negatif pada efektivitas penegakan hukum.

Pendidikan etika tidak hanya bermanfaat bagi kualitas pelayanan Polri, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dalam situasi yang penuh tekanan, anggota Polri harus mampu mengedepankan prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti tekanan politik, ekonomi, atau sosial. Pendidikan etika mengajarkan pentingnya objektivitas dan transparansi dalam mengambil keputusan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Penegakan hukum yang adil tidak hanya diukur dari seberapa tegas Polri dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga dari sejauh mana mereka dapat melibatkan masyarakat dalam proses yang transparan dan tidak diskriminatif. Dengan pendidikan etika yang mengutamakan keadilan sosial, Polri dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan yang setara bagi semua orang, dan menjaga hak asasi manusia dalam setiap tahap proses hukum.

Pendidikan etika yang baik di Polri tidak hanya membentuk perilaku anggota di lapangan, tetapi juga menciptakan pemimpin yang mampu memberikan teladan yang baik bagi anggotanya. Pemimpin yang berintegritas dan etis akan memperlihatkan kepada bawahannya bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi yang sulit dan penuh tantangan. Pemimpin yang berkomitmen terhadap nilai-nilai etika akan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin, anggota Polri akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang telah diajarkan.

Pemimpin yang berintegritas juga akan mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi Polri, yang semakin memperkuat kepercayaan publik. Ketika pemimpin menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk diawasi dan terbuka terhadap kritik konstruktif, masyarakat akan lebih merasa dihargai dan yakin bahwa Polri bekerja untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

1.5. Pengawasan Eksternal sebagai Pilar Penguatan Ketaatan Etika di Polri

Pengawasan eksternal memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan etika di Polri, berfungsi sebagai alat kontrol yang memberikan pengawasan dari luar institusi. Secara umum, pengawasan eksternal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan anggota Polri sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Pengawasan ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran yang bisa merusak brand institusi Polri, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme dan integritas Polri sebagai lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, pengawasan eksternal

berperan sebagai pendorong bagi Polri untuk terus meningkatkan standar etika dan akuntabilitas mereka dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Propam memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga etika Polri. Kompolnas bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Polri, memastikan bahwa setiap tindakan Polri sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Sedangkan Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan internal terhadap perilaku dan disiplin anggota Polri. Fungsi kedua lembaga ini tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga mencakup penyelidikan terhadap laporan-laporan masyarakat terkait pelanggaran etika oleh anggota Polri. Kerja sama antara Kompolnas, Propam, dan Polri itu sendiri sangat krusial dalam memastikan bahwa sistem pengawasan berjalan secara efektif dan objektif.

Selain itu, masyarakat dan media memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi tindakan Polri. Dalam era digital seperti sekarang, media sosial menjadi salah satu saluran penting untuk menyampaikan informasi kepada publik, termasuk dalam hal pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Polri. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan atau alami melalui berbagai platform pengaduan yang telah disediakan oleh Polri maupun lembaga pengawasan eksternal. Peran media, baik media massa tradisional maupun media sosial, sangat membantu dalam memantau dan mengungkapkan tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh anggota Polri, serta memastikan bahwa publik dapat memperoleh informasi yang jelas dan transparan. Dengan peran aktif masyarakat dan media, Polri lebih terdorong untuk

bertindak secara etis, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka akan mendapat perhatian publik.

Kolaborasi yang solid antara pengawasan internal Polri dan pengawasan eksternal sangat penting dalam mengurangi pelanggaran etika. Pengawasan eksternal tidak dapat berfungsi optimal tanpa adanya dukungan dari internal Polri, dan begitu pula sebaliknya. Dengan adanya kolaborasi yang baik, misalnya antara Kompolnas, Propam, dan lembaga-lembaga masyarakat, proses pengawasan akan lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika. Hal ini juga menciptakan transparansi yang lebih besar dalam setiap langkah Polri, sehingga kepercayaan publik dapat terus terjaga. Kolaborasi ini juga memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tepat, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau pengabaian terhadap kode etik.

Namun, tantangan terbesar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal adalah adanya potensi hambatan yang muncul, baik dari dalam tubuh Polri maupun dari faktor eksternal lainnya. Salah satunya adalah minimnya sumber daya untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh dan menyelidiki setiap laporan pelanggaran. Selain itu, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan yang ada juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa individu mungkin merasa bahwa pengawasan eksternal belum cukup efektif atau terkadang terkesan hanya sebagai prosedur administratif yang tidak memberi dampak nyata. Untuk itu, penting bagi Polri dan lembaga-lembaga pengawasan untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan, serta memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan eksternal dapat berfungsi lebih optimal, sehingga integritas Polri sebagai penegak hukum dapat terus terjaga dengan baik.

A. Fungsi Pengawasan Eksternal dalam Menjaga Etika Polri

Pengawasan eksternal berfungsi untuk memastikan bahwa institusi Polri bertindak dengan transparansi, akuntabilitas, dan dalam koridor hukum yang berlaku. Tanpa adanya pengawasan eksternal yang efektif, Polri bisa saja terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika, baik secara sengaja maupun tidak. Salah satu manfaat utama pengawasan eksternal adalah menciptakan keseimbangan kekuasaan antara institusi Polri dengan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan.

Pengawasan eksternal juga berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan internal Polri yang mungkin tidak berjalan dengan optimal. Dalam beberapa kasus, pengawasan internal Polri bisa saja terhambat oleh konflik kepentingan atau adanya tekanan internal yang menghalangi penegakan disiplin yang tegas terhadap anggota yang melanggar etika. Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang independen dan objektif sangat diperlukan untuk menjamin bahwa setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan prosedur yang ada.

B. Lembaga Pengawasan Eksternal yang Berperan dalam Polri

Di Indonesia, pengawasan eksternal terhadap kinerja Polri sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi tersebut. Beberapa lembaga memiliki peran vital dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas Polri. Dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengawasan eksternal Polri adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan). Kedua lembaga ini berfungsi untuk memastikan bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai

dengan prinsip-prinsip etika, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ini.

Kompolnas adalah lembaga pengawas eksternal yang memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Polri. Kompolnas bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait perbaikan kinerja Polri, baik dalam hal pelayanan publik, penegakan hukum, maupun dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggotanya. Kompolnas bertindak sebagai jembatan antara Polri dan masyarakat, dengan memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.

Fungsi Kompolnas sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam institusi Polri. Melalui Kompolnas, masyarakat dapat mengajukan keluhan atau aduan terkait tindakan tidak etis yang dilakukan oleh anggota Polri, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pelanggaran hak asasi manusia. Kompolnas kemudian menindaklanjuti pengaduan tersebut, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Polri. Selain itu, Kompolnas juga terlibat dalam pembahasan dan evaluasi kebijakan-kebijakan Polri untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Pada tahun 2018, Kompolnas melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus pembunuhan yang melibatkan anggota Polri di Poso, Sulawesi Tengah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Kompolnas turun tangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memperbaiki prosedur dalam menangani kasus serupa di masa depan, serta memastikan bahwa tindakan anggota Polri tidak melanggar hak asasi manusia. Sebagai hasil dari pengawasan ini,

beberapa anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dikenakan sanksi dan diharapkan kasus ini menjadi pelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme Polri dalam bertugas.

Selain itu, Kompolnas juga sering terlibat dalam memberikan rekomendasi terkait masalah pengawasan internal, seperti pemilihan dan promosi pejabat Polri, untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Dalam hal ini, Kompolnas berperan penting dalam menciptakan mekanisme kontrol yang efektif terhadap institusi Polri.

Sementara Kompolnas berfokus pada pengawasan eksternal, Propam berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal Polri yang mengawasi disiplin dan perilaku anggotanya. Propam bertanggung jawab untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Propam mencakup penyelidikan terhadap tindakan yang melanggar disiplin, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, dan tindakan tidak etis lainnya.

Propam juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap proses seleksi, pendidikan, dan pembinaan anggota Polri. Melalui evaluasi ini, Propam memastikan bahwa setiap anggota Polri memahami dan mampu menerapkan kode etik profesi dalam pelaksanaan tugasnya, baik di lapangan maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Propam juga memainkan peran dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus kriminal atau pelanggaran berat, dengan memastikan bahwa proses hukum terhadap anggota tersebut dilakukan secara objektif dan tanpa ada campur tangan yang tidak sah.

Pada tahun 2020, kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri di Jakarta menarik perhatian publik setelah sebuah

video yang menunjukkan seorang polisi memukul seorang pengemudi viral di media sosial. Propam segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap anggota yang terlibat dalam insiden tersebut. Hasil dari investigasi Propam menunjukkan bahwa anggota Polri tersebut telah melanggar kode etik dan disiplin Polri, serta bertindak tidak profesional dalam menangani situasi tersebut. Sebagai akibatnya, anggota Polri yang terlibat diberikan sanksi disipliner yang tegas, termasuk pemberhentian sementara dan pelatihan ulang terkait cara berinteraksi dengan masyarakat secara etis dan profesional. Kasus ini menunjukkan bagaimana Propam berperan dalam memastikan bahwa tindakan tidak etis atau pelanggaran oleh anggota Polri ditangani dengan serius dan memberikan efek jera, serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Selain pengawasan terhadap disiplin anggota, Propam juga memainkan peran dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Polri, untuk memastikan bahwa setiap calon anggota Polri dilatih dengan pengetahuan etika yang memadai. Evaluasi ini penting untuk membentuk karakter anggota Polri yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen terhadap etika dalam menjalankan tugas mereka.

Meskipun Korpri dan Propam memiliki peran yang berbeda Korpri lebih berfokus pada pengawasan eksternal dan Propam pada pengawasan internal—kedua lembaga ini sering kali bekerja sama dalam menangani isu-isu yang lebih besar atau kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kode etik yang serius. Kolaborasi ini memastikan bahwa pengawasan terhadap Polri dilakukan secara holistik, dengan melibatkan perspektif baik dari dalam maupun luar institusi Polri. Kolaborasi antara kedua lembaga ini juga membantu menciptakan sistem kontrol yang lebih

transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

C. Peran Masyarakat dalam Pengawasan Eksternal

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan eksternal terhadap Polri. Sebagai pihak yang dilayani oleh institusi Polri, masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum tidak melanggar etika, prinsip keadilan, atau hak asasi manusia. Dengan semakin terbukanya akses informasi melalui teknologi komunikasi dan media sosial, masyarakat kini memiliki saluran yang lebih mudah untuk mengawasi kinerja Polri, melaporkan dugaan pelanggaran, dan berpartisipasi dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu perubahan besar yang terjadi di era digital adalah berkembangnya media sosial sebagai platform untuk pengawasan eksternal. Media sosial tidak hanya digunakan untuk berbagi informasi atau opini, tetapi juga menjadi alat yang sangat efektif untuk masyarakat dalam mengungkapkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Polri. Melalui platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau YouTube, masyarakat dapat dengan cepat menyebarkan informasi terkait tindakan Polri yang dianggap melanggar kode etik atau prinsip keadilan, yang dapat langsung menjadi perhatian publik. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk secara aktif mengawasi, mengkritik, dan memberikan masukan kepada Polri.

Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu, sebuah video yang menunjukkan anggota Polri menggunakan kekerasan berlebihan terhadap seorang pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas viral di media sosial. Video tersebut mendapat perhatian besar dari publik, yang mengkritik tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Dalam waktu

singkat, video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian berbagai lembaga pengawasan, termasuk Kompolnas dan Propam, yang segera mengambil tindakan untuk menyelidiki insiden tersebut. Kejadian ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat pengawasan yang sangat efektif dan mendorong respons cepat dari Polri untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

Selain media sosial, saluran pengaduan yang disediakan oleh Polri atau lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas juga memberikan masyarakat kesempatan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Saluran pengaduan ini dapat berupa pusat layanan pengaduan, situs web, atau aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan atau laporan secara langsung kepada Polri atau lembaga terkait. Pengawasan masyarakat melalui pengaduan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Polri tidak bertindak sewenang-wenang dan tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Sebagai contoh, Kompolnas menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran oleh anggota Polri. Salah satu kasus yang menunjukkan efektivitas pengawasan masyarakat melalui saluran pengaduan adalah saat seorang anggota Polri diduga melakukan kekerasan terhadap seorang demonstran. Setelah menerima laporan dari masyarakat melalui pengaduan resmi, Kompolnas melakukan investigasi yang melibatkan pihak terkait dan memastikan bahwa proses hukum diterapkan dengan adil. Selain itu, hasil investigasi Kompolnas memberikan rekomendasi perbaikan kepada Polri, termasuk pelatihan lebih lanjut bagi anggotanya tentang cara berinteraksi dengan masyarakat secara profesional dan humanis. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam

memberikan pengawasan terhadap kinerja Polri, serta bagaimana Polri merespons kritik dengan tindakan yang konstruktif.

Namun, pengawasan eksternal oleh masyarakat harus dilakukan dengan bijaksana dan berdasarkan pada fakta. Ketika informasi yang tidak benar atau hoaks tersebar, hal tersebut bisa merusak reputasi Polri secara tidak adil dan mengganggu proses penegakan hukum yang transparan dan adil. Penyebaran informasi palsu atau tuduhan tanpa dasar yang jelas dapat menciptakan ketegangan antara Polri dan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengedukasi diri mereka tentang cara-cara yang tepat dalam melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan atau melaporkan sesuatu, serta pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam menyampaikan kritik atau laporan. Dalam hal ini, lembaga pengawasan eksternal seperti Kompolnas juga memiliki peran penting dalam memberikan panduan kepada masyarakat tentang bagaimana melaporkan pelanggaran secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Salah satu contoh nyata dari peran masyarakat dalam pengawasan eksternal terhadap Polri adalah kasus penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri dalam operasi penegakan hukum. Pada tahun 2019, sebuah video yang menunjukkan anggota Polri melakukan pemerasan terhadap seorang warga yang terlibat dalam kasus lalu lintas menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, anggota Polri terlihat meminta sejumlah uang kepada warga tersebut untuk membebaskannya dari sanksi hukum.

Setelah video tersebut viral, banyak masyarakat yang menyuarakan kritik mereka di media sosial dan melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan oleh Kompolnas. Masyarakat merasa bahwa tindakan tersebut tidak hanya merusak citra Polri tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kompolnas segera menanggapi laporan tersebut dengan melakukan investigasi yang mendalam dan memastikan bahwa anggota Polri yang terlibat diberikan sanksi disipliner yang sesuai. Proses ini menunjukkan bagaimana pengawasan masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam memastikan bahwa Polri bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme.

Edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara yang tepat dalam melakukan pengawasan sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang konstruktif dan berbasis pada fakta. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang prosedur pengaduan yang benar, bagaimana cara mengevaluasi informasi yang diterima, dan pentingnya menjaga objektivitas dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan edukasi yang baik, masyarakat akan lebih mampu berperan dalam menciptakan Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, tanpa terjebak dalam penyebaran hoaks atau informasi yang tidak berdasar.

D. Kolaborasi antara Pengawasan Eksternal dan Internal

Pengawasan eksternal yang efektif tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan yang kuat dan sistem pengawasan internal yang solid di dalam Polri itu sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi yang erat antara pengawasan eksternal dan internal sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan adil. Kompolnas, Propam, serta lembaga-lembaga pengawasan eksternal lainnya berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja Polri, tetapi

keberhasilan pengawasan ini sangat bergantung pada sejauh mana Polri siap untuk bekerja sama, mengadopsi masukan, dan menindaklanjuti temuan yang ada dengan serius.

Kolaborasi antara pengawasan eksternal dan internal yang efektif tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketika masyarakat melihat bahwa ada sistem pengawasan yang adil dan tidak pandang bulu, serta bahwa tindakan yang tidak etis atau pelanggaran hukum oleh anggota Polri ditindaklanjuti dengan cepat, maka kepercayaan terhadap Polri akan meningkat. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa ada prosedur yang jelas untuk menangani setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau lembaga pengawasan eksternal, serta bahwa tindakan perbaikan yang diperlukan dilakukan dengan tegas.

Kolaborasi antara pengawasan eksternal dan internal Polri dapat dilakukan dengan lebih efektif apabila Polri juga memiliki sistem pengawasan internal yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Dalam hal ini, Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan) memainkan peran penting sebagai lembaga internal yang bertugas mengawasi disiplin dan etika anggota Polri, sementara Korpri dan lembaga pengawas eksternal lainnya berfungsi untuk mengawasi kinerja Polri dari luar institusi. Kedua sistem pengawasan ini perlu saling melengkapi, agar setiap pelanggaran yang ditemukan, baik oleh pihak internal maupun eksternal, bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Namun, dalam banyak kasus, pengawasan eksternal menghadapi tantangan berupa hambatan dari dalam tubuh Polri itu sendiri. Hambatan ini bisa berupa birokrasi yang memperlambat proses penyelidikan atau ketidakpercayaan terhadap sistem pengawasan yang ada. Dalam beberapa kasus, pengawasan eksternal bisa jadi terhambat oleh kesulitan dalam memperoleh akses informasi atau data yang diperlukan untuk

memverifikasi laporan pelanggaran. Oleh karena itu, Polri harus memastikan bahwa pengawasan internal mereka sepenuhnya transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Jika ada keberanian untuk melakukan evaluasi dan perubahan internal yang diperlukan, maka pengawasan eksternal akan lebih mudah berfungsi dengan efektif.

Kolaborasi antara pengawasan eksternal dan internal membutuhkan adanya keterbukaan dalam proses-proses pengawasan tersebut. Polri harus bersedia untuk bekerja sama dengan lembaga pengawas eksternal dan memberikan akses yang dibutuhkan agar proses pengawasan berjalan lancar. Ini tidak hanya berarti menyediakan akses terhadap data dan informasi yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran ditindaklanjuti tanpa ada intervensi atau upaya untuk menutup-nutupi pelanggaran.

Sebagai contoh, jika Propam menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, tetapi lembaga pengawasan eksternal seperti Kopolnas merasa bahwa proses investigasi tidak transparan atau tidak memadai, maka kolaborasi yang buruk antara pengawasan internal dan eksternal dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, jika Kopolnas diberikan akses penuh untuk meninjau temuan-temuan Propam dan memberikan masukan serta rekomendasi yang konstruktif, proses pengawasan menjadi lebih efektif dan tidak terbatas hanya pada pengawasan internal Polri.

Salah satu contoh nyata dari kolaborasi antara pengawasan eksternal dan internal dalam Polri dapat dilihat pada penanganan kasus kekerasan oleh anggota Polri dalam penanganan demonstrasi pada tahun 2019. Pada saat itu, sejumlah video yang menunjukkan anggota Polri menggunakan kekerasan berlebihan terhadap para demonstran viral di media sosial. Masyarakat melalui Kopolnas

langsung mengajukan laporan pengaduan terkait insiden tersebut, dan dalam waktu singkat Kopolnas melakukan investigasi.

Di sisi lain, Propam sebagai lembaga internal Polri juga melakukan evaluasi terhadap anggota Polri yang terlibat dalam insiden tersebut. Kolaborasi yang baik antara Kopolnas dan Propam memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya ditindaklanjuti oleh satu lembaga, tetapi juga oleh lembaga eksternal yang dapat memberikan pandangan objektif, sementara Propam melakukan investigasi lebih dalam dari sisi internal. Hasil investigasi tersebut kemudian menghasilkan tindakan disipliner yang tegas terhadap anggota Polri yang terlibat, serta rekomendasi untuk melakukan pelatihan ulang mengenai prosedur penggunaan kekuatan yang proporsional dalam menangani demonstrasi.

Namun, tantangan dalam kolaborasi pengawasan ini juga terlihat pada beberapa kasus di mana hambatan birokrasi dan konflik kepentingan menghalangi efektivitas pengawasan eksternal. Dalam beberapa insiden, pengawasan terhadap anggota Polri terhambat karena adanya ketidaksiapan dalam koordinasi antar lembaga, atau karena ada anggota Polri yang memiliki kedekatan atau pengaruh di tingkat tinggi yang mengurangi independensi pengawasan. Dalam situasi seperti ini, pengawasan eksternal tidak akan maksimal karena adanya hambatan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Untuk mengatasi masalah ini, Polri perlu memastikan bahwa pengawasan internal mereka sepenuhnya bebas dari campur tangan politik atau kepentingan pribadi, dan harus diatur dengan jelas dalam sistem yang transparan. Selain itu, lembaga pengawasan eksternal seperti Kopolnas harus diberikan kebebasan penuh dalam melakukan tugas mereka tanpa intervensi atau tekanan dari pihak internal Polri, sehingga mereka dapat bertindak sebagai pengawas yang objektif dan memberikan masukan yang konstruktif.

E. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Eksternal

Meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal terhadap Polri adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme institusi penegak hukum ini. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa anggota Polri tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etika, keadilan, dan hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk memperkuat pengawasan eksternal, memperluas akses publik dalam pelaporan, dan memastikan kolaborasi yang lebih baik antara Polri dan lembaga pengawasan eksternal.

1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pengawasan Eksternal

Langkah pertama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pengawas eksternal, seperti Kompolnas dan Propam. Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang sangat krusial dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri, tetapi untuk menjalankan tugas mereka dengan optimal, mereka memerlukan dukungan sumber daya yang cukup. Dukungan ini tidak hanya berupa anggaran yang memadai, tetapi juga peningkatan jumlah personel yang memiliki kompetensi dalam bidang investigasi, etika, dan hak asasi manusia.

Peningkatan kapasitas juga mencakup pelatihan bagi anggota Kompolnas dan Propam untuk menangani laporan pelanggaran dengan cara yang lebih profesional dan efektif. Lembaga-lembaga ini perlu dibekali dengan pengetahuan terbaru tentang dinamika sosial, perubahan hukum, dan penggunaan teknologi dalam investigasi. Selain itu, mereka juga harus memiliki akses kepada data dan informasi yang relevan dari Polri, agar bisa melakukan investigasi yang lebih transparan dan akurat. Pada 2019, Kompolnas

melakukan evaluasi terhadap sistem pengaduan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Polri. KOMPOLNAS menemukan bahwa salah satu kendala dalam pengawasan adalah terbatasnya sumber daya untuk menangani volume pengaduan yang besar. Sebagai respons, KOMPOLNAS meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran dan kapasitas operasional mereka. Dengan adanya tambahan sumber daya dan pelatihan yang lebih baik, KOMPOLNAS dapat lebih efektif menanggapi dan menyelesaikan laporan pelanggaran yang diterima, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri.

2. Memperkuat Transparansi dalam Proses Investigasi

Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa pengawasan eksternal terhadap Polri berjalan dengan adil dan efektif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pengawasan eksternal adalah ketidakjelasan dalam proses investigasi dan tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran yang diterima. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal, sangat penting untuk memperkuat transparansi dalam setiap langkah investigasi.

Transparansi dalam pengawasan bukan hanya mengenai publikasi hasil investigasi, tetapi juga tentang keterbukaan dalam proses-proses awal hingga akhir. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana laporan mereka diproses, siapa yang bertanggung jawab dalam menangani laporan, dan apa langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini akan memberi rasa aman kepada masyarakat bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga benar-benar menciptakan perubahan yang diinginkan.

Kasus yang melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri dalam penanganan kasus narkoba beberapa

tahun lalu memicu protes dari masyarakat karena mereka merasa bahwa proses investigasi tidak transparan. Kopolnas, setelah menerima banyak laporan, memutuskan untuk mengungkapkan rincian proses investigasi kepada publik dan secara terbuka memberikan hasil evaluasi mereka. Dengan cara ini, masyarakat merasa bahwa kasus tersebut diproses secara transparan dan keadilan tercapai. Kopolnas juga menyarankan agar Polri memperbaiki sistem pelaporan dan komunikasi dengan masyarakat agar pengawasan lebih terintegrasi dan akuntabel.

3. Memperluas Akses Masyarakat untuk Melaporkan Pelanggaran secara Aman dan Anonim

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal, penting untuk memperluas akses bagi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan anonim.

Penyediaan saluran pengaduan yang aman dan anonim akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang takut akan pembalasan jika melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Pengaduan yang dapat dilakukan secara anonim juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi perilaku anggota Polri tanpa khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu, saluran digital ini dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dengan lebih efisien, tanpa melalui prosedur yang rumit atau membutuhkan waktu yang lama.

Sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan ruang aman bagi masyarakat, beberapa lembaga pengawasan eksternal, termasuk Kopolnas, telah mengembangkan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan

pengaduan secara anonim. Salah satu contohnya adalah aplikasi mobile yang memungkinkan warga untuk melaporkan pelanggaran tanpa mengungkapkan identitas mereka. Penggunaan aplikasi ini telah membantu banyak orang merasa lebih nyaman untuk melaporkan kasus pelanggaran yang melibatkan anggota Polri, meningkatkan jumlah laporan yang diterima dan mempermudah proses investigasi.

4. Meningkatkan Kolaborasi antara Polri dan Lembaga Pengawasan Eksternal

Polri perlu lebih aktif dalam membangun hubungan yang positif dengan lembaga pengawasan eksternal dan masyarakat. Kolaborasi yang lebih baik antara Polri dan lembaga pengawasan eksternal seperti Kopolnas, Propam, serta lembaga lain yang terkait sangat penting untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Hal ini juga akan mempermudah proses pengawasan dan membantu Polri mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada dalam kinerja mereka.

Selain itu, Polri juga perlu terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh lembaga pengawasan eksternal. Penguatan komunikasi antara kedua belah pihak dapat mempercepat proses perubahan yang diperlukan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Polri perlu menunjukkan komitmen untuk terus beradaptasi dengan masukan dari pengawasan eksternal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki citra mereka.

Pada tahun 2020, Polri mengadakan serangkaian diskusi dengan Kopolnas mengenai cara-cara untuk meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum dan pengawasan internal. Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk pembenahan dalam proses rekrutmen dan pendidikan anggota

Polri serta penguatan sistem pengaduan masyarakat. Kolaborasi antara Polri dan Kompolnas dalam hal ini menunjukkan bagaimana kedua lembaga dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan yang positif dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti dengan tepat.

1.6. Tantangan dalam Meningkatkan Kesadaran Etika di Polri di Tengah Perubahan Sosial

Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, kesadaran etika anggota Polri menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinamika sosial dan budaya yang berkembang, terutama dengan adanya pengaruh globalisasi, membawa perubahan signifikan dalam cara pandang dan perilaku masyarakat, termasuk anggota Polri. Masyarakat kini lebih terbuka dan kritis terhadap tindakan aparat penegak hukum, sementara anggota Polri harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, tanpa kehilangan komitmen terhadap nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi pedoman mereka. Pengaruh budaya populer, nilai-nilai yang berkembang di media sosial, dan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap Polri turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota Polri, yang kadang dapat berpotensi merusak kesadaran etika dalam bertindak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana dinamika sosial ini berperan dalam membentuk perilaku etis anggota Polri.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana Polri beradaptasi dengan etika di era milenial dan digital. Generasi milenial yang lebih terhubung dengan teknologi dan media sosial membawa tantangan baru dalam penegakan etika. Di satu sisi, media sosial memberikan anggota Polri akses yang lebih luas kepada masyarakat, namun di sisi lain, penggunaan teknologi dapat memperburuk pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan kekuasaan, penyebaran informasi pribadi, atau pelanggaran

lainnya yang dapat cepat tersebar dan menjadi viral. Untuk itu, Polri harus mampu mengembangkan pemahaman etika yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan zaman, tanpa terjerat oleh godaan atau tekanan yang datang dari perkembangan teknologi. Hal ini membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada kesadaran digital yang harus dimiliki oleh setiap anggota Polri.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran etika, pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi sangat diperlukan. Program pendidikan etika harus melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengenalan nilai-nilai dasar seperti keadilan, transparansi, dan integritas, hingga pelatihan yang melibatkan skenario nyata yang menguji sikap dan perilaku anggota Polri dalam menghadapi situasi yang kompleks. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui pembinaan berbasis pengalaman, di mana anggota Polri diajak untuk merenungkan dan berdiskusi mengenai kasus-kasus pelanggaran etika yang pernah terjadi. Selain itu, pendekatan berbasis teknologi juga bisa diterapkan, misalnya dengan menggunakan platform digital untuk pelatihan etika atau simulasi situasi yang menantang etika profesi. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran etika anggota Polri dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah.

Namun, dalam menumbuhkan kesadaran etika, ada sejumlah kendala yang perlu diatasi, terutama di kalangan generasi muda Polri. Banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh budaya populer atau perilaku yang berkembang di media sosial, yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi. Generasi muda juga sering kali menghadapi tekanan yang lebih besar dalam menjalani tugas mereka, baik dari internal Polri maupun dari ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam menghadapi situasi nyata yang

menguji integritas mereka juga bisa menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk terus memperkuat pendidikan etika yang lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda, serta menyediakan pendampingan dan mentoring yang bisa membantu mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika dengan lebih baik.

Beberapa pengalaman dan studi kasus terkait upaya meningkatkan kesadaran etika di Polri dapat memberikan gambaran tentang bagaimana upaya tersebut dapat dilakukan secara efektif. Misalnya, beberapa program pelatihan etika yang melibatkan diskusi kasus dan simulasi situasi nyata telah menunjukkan hasil yang positif dalam membentuk karakter anggota Polri yang lebih profesional dan berintegritas. Di negara-negara lain, keberhasilan program pendidikan etika sering kali dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga eksternal yang memberikan masukan dan pengawasan terhadap perilaku anggota Polri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran etika tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Polri dapat terus menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.

A. Perubahan Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Polri

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak hanya mencakup kemajuan teknologi dan informasi, tetapi juga pergeseran nilai-nilai budaya yang berkembang pesat. Dalam banyak kasus, nilai-nilai tradisional yang sebelumnya mendasari hubungan antara anggota Polri dan masyarakat kini mulai digantikan oleh nilai-nilai yang lebih modern dan progresif.

Perubahan ini menciptakan tantangan baru bagi Polri dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta dalam menjalankan tugas penegakan hukum dengan penuh integritas.

Misalnya, dalam beberapa kasus, semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Polri dalam hal transparansi, responsivitas, dan penggunaan teknologi yang etis, memaksa Polri untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Teknologi yang terus berkembang membawa kemudahan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, tetapi juga menambah tantangan baru terkait pelanggaran etika, seperti penyalahgunaan media sosial dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin.

Budaya sosial yang berkembang, seperti meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk menuntut keadilan secara instan melalui media sosial, juga menjadi tantangan bagi Polri dalam menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Dalam beberapa kasus, ekspektasi publik yang terlalu tinggi atau tidak realistis dapat menekan anggota Polri untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kode etik, guna memenuhi tuntutan tersebut.

A. Peran Media Sosial dalam Menuntut Etika yang Lebih Tinggi

Media sosial telah menjadi salah satu elemen yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan dampak besar tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada institusi seperti Polri. Di satu sisi, media sosial membuka peluang bagi Polri untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, memberikan informasi langsung, serta menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan. Namun, di sisi lain, media sosial juga menambah tekanan besar bagi Polri, karena setiap tindakan yang diambil oleh anggota Polri bisa dengan cepat terungkap dan mendapat sorotan publik.

Media sosial memungkinkan Polri untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, tanpa perantara. Melalui platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube, Polri dapat memberikan informasi terkini mengenai kebijakan, operasi, atau langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum. Media sosial juga memungkinkan Polri untuk menjelaskan tindakan mereka secara transparan kepada publik, serta memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang sering kali menjadi kontroversi. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum ini.

Selain itu, media sosial dapat digunakan oleh Polri untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan keadilan. Misalnya, Polri dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan kampanye terkait kesadaran hukum, anti-kekerasan, atau menghormati hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang berbasis pada edukasi dan transparansi, Polri dapat memperlihatkan kepada publik bahwa mereka tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berkomitmen pada prinsip keadilan dan etika dalam setiap tindakan mereka.

Pada saat terjadi bencana alam atau insiden besar, Polri seringkali memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi langsung dan memperingatkan masyarakat. Misalnya, saat bencana alam di Palu pada tahun 2018, Polri menggunakan Twitter dan Instagram untuk memberikan update tentang situasi terkini, langkah-langkah penyelamatan yang diambil, dan cara masyarakat dapat membantu atau mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk membangun komunikasi yang lebih cepat dan efektif antara Polri dan masyarakat.

Namun, meskipun media sosial memberikan banyak manfaat, ia juga menciptakan tekanan besar bagi Polri. Setiap

keputusan atau tindakan yang diambil oleh anggota Polri dapat dengan mudah terungkap dan mendapatkan sorotan publik. Ini berarti bahwa media sosial dapat memperbesar setiap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dalam beberapa kasus dapat merusak citra Polri secara keseluruhan. Penyebaran informasi yang salah atau hoaks juga dapat memperburuk situasi, mengakibatkan kerusakan reputasi yang cepat dan sulit untuk diperbaiki.

Penyalahgunaan media sosial oleh anggota Polri menjadi isu penting dalam hal pengawasan dan pendidikan etika. Anggota Polri yang tidak menyadari dampak dari perilaku mereka di media sosial dapat dengan mudah terjatuh dalam masalah yang dapat merusak integritas mereka, serta citra Polri di mata publik. Penyebaran informasi pribadi, ujaran kebencian, atau pengungkapan informasi yang tidak sah dapat dengan cepat menyebar di platform-platform tersebut, mengundang kritik yang luas dari masyarakat dan media.

Pada 2020, sebuah kasus yang melibatkan seorang anggota Polri yang mengunggah komentar bernada diskriminatif terhadap kelompok tertentu di media sosial mendapat perhatian besar. Komentar tersebut langsung tersebar luas dan menuai kecaman dari berbagai pihak. Polri, melalui Kompolnas dan Propam, segera melakukan penyelidikan terhadap anggota yang bersangkutan dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Kasus ini menunjukkan bagaimana kesalahan kecil di media sosial bisa merusak reputasi besar dan memberikan dampak negatif yang luas.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendidikan etika digital menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan dan pelatihan anggota Polri. Pendidikan etika digital bertujuan untuk mengedukasi anggota Polri tentang pentingnya bertindak bijak dan profesional di dunia maya, serta memahami dampak dari

setiap unggahan atau komentar yang mereka buat di media sosial. Mereka perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana memisahkan kehidupan pribadi dan profesional di dunia digital, serta bagaimana menjaga privasi, etika komunikasi, dan integritas dalam setiap interaksi online.

Anggota Polri harus memahami bahwa mereka adalah representasi dari institusi, dan setiap tindakan di media sosial dapat mempengaruhi citra Polri. Mereka harus dilatih untuk menggunakan media sosial secara profesional, menjaga batasan antara kehidupan pribadi dan profesional, serta menghindari berbagi informasi yang tidak relevan atau sensitif.

Anggota Polri perlu diberi pemahaman tentang pentingnya memverifikasi informasi sebelum dibagikan atau dipublikasikan. Mereka juga perlu dilatih untuk menghindari terlibat dalam penyebaran hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang sensitif atau kontroversial.

Pendidikan etika digital harus menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghargai dan menghindari komentar atau unggahan yang bersifat diskriminatif, rasial, atau merendahkan pihak lain. Ujaran kebencian tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Polri harus dilatih untuk menyadari bahwa di dunia maya, pesan mereka dapat menyebar dengan sangat cepat dan mendapat perhatian luas. Oleh karena itu, mereka harus berpikir lebih panjang sebelum mengunggah atau berkomunikasi di media sosial, memastikan bahwa pesan yang disampaikan mencerminkan sikap profesional dan mengutamakan kepentingan publik.

Beberapa tahun yang lalu, Polri mengadakan pelatihan mengenai etika digital bagi anggotanya, dengan fokus pada penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Pelatihan ini

mencakup materi tentang menjaga profesionalisme di dunia maya, serta cara-cara untuk menangani dan merespons kritik yang muncul di media sosial dengan bijaksana dan tidak reaktif. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya menjaga citra Polri dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi di dunia maya.

B. Menghadapi Tantangan Generasi Milenial dan Digitalisasi

Generasi milenial, yang telah tumbuh besar dengan kemajuan teknologi dan media sosial, memiliki cara pandang yang berbeda terhadap institusi dan pelayanan publik, termasuk Polri. Mereka cenderung lebih kritis terhadap kebijakan dan tindakan Polri, serta mengharapkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas yang lebih tinggi. Kehadiran generasi ini, yang lebih terhubung dengan dunia digital, membawa tantangan baru bagi Polri dalam menjaga brand mereka, terutama terkait dengan penggunaan teknologi, media sosial, dan interaksi dengan masyarakat yang semakin terbuka.

Dengan adanya digitalisasi yang masif, Polri dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan menilai institusi. Generasi milenial, yang sudah sangat terbiasa dengan teknologi dan media sosial, menginginkan pengalaman pelayanan publik yang lebih langsung, transparan, dan responsif. Oleh karena itu, Polri harus beradaptasi dengan kebutuhan ini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme yang menjadi landasan tugas mereka.

Generasi milenial memiliki harapan tinggi terhadap Polri dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Mereka lebih sering menggunakan media sosial untuk mengungkapkan opini dan kritik, dan mereka menginginkan Polri untuk beroperasi dengan keterbukaan penuh terhadap masyarakat. Media sosial, yang

memungkinkan informasi tersebar cepat, memberikan peluang bagi Polri untuk berkomunikasi langsung dengan publik, namun juga meningkatkan tantangan bagi Polri untuk menjaga citra positif mereka di mata masyarakat.

Selain itu, generasi milenial lebih mengutamakan akses informasi yang cepat dan mudah. Mereka mengharapkan adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait kebijakan Polri, langkah-langkah yang diambil dalam penegakan hukum, serta transparansi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat. Polri harus memahami bahwa keterbukaan informasi bukan hanya menjadi keinginan, tetapi sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang lebih terhubung secara digital. Hal ini mendorong Polri untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan keterbukaan dalam memberikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.

Sebagian besar anggota Polri yang lebih muda, yang sering kali lebih terpapar dengan budaya digital dan teknologi, memerlukan pembekalan yang memadai mengenai etika digital dan penggunaan teknologi secara bijaksana. Mereka cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tren media sosial dan budaya digital yang berkembang cepat, yang bisa membuat mereka terjebak dalam perilaku konsumtif dan mencari perhatian sesaat. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk memberikan pelatihan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum dan prosedural, tetapi juga pada pengembangan kesadaran etika yang sesuai dengan tantangan digital saat ini.

Pendidikan etika digital harus menjadi bagian integral dalam pelatihan anggota Polri, khususnya yang lebih muda. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman mengenai pentingnya menjaga profesionalisme di dunia maya, memahami dampak dari setiap interaksi online, dan menjaga citra Polri di tengah sorotan publik. Anggota Polri muda perlu memahami bahwa setiap unggahan, komentar, atau tindakan mereka di dunia digital dapat

berpengaruh besar terhadap reputasi pribadi dan institusi. Mereka harus dibekali dengan keterampilan untuk membedakan antara kehidupan pribadi dan profesional di media sosial, serta memahami bahwa sebagai aparat penegak hukum, mereka adalah teladan bagi masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar bagi Polri adalah menumbuhkan kesadaran etika di kalangan anggota yang terlahir di tengah perkembangan teknologi ini, yang sering kali membawa pengaruh budaya konsumtif dan instan. Generasi milenial cenderung lebih terfokus pada pengakuan cepat dan viralitas di media sosial, yang kadang bisa mendorong mereka untuk membuat keputusan yang lebih mengutamakan popularitas daripada prinsip-prinsip moral dan profesionalisme. Hal ini bisa mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik, seperti membagikan informasi pribadi, melakukan tindakan yang berlebihan untuk mendapatkan perhatian, atau terlibat dalam penyebaran hoaks.

Oleh karena itu, Polri harus mampu membekali generasi milenial ini dengan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip etika yang sesuai dengan tantangan zaman. Pendidikan etika harus melibatkan pengajaran tentang nilai-nilai yang lebih besar daripada sekadar mengejar popularitas atau perhatian sesaat. Anggota Polri harus diberi pemahaman yang kuat bahwa tujuan utama mereka adalah untuk melayani masyarakat dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen terhadap keadilan, bukan untuk mengejar keuntungan pribadi atau citra yang cepat viral.

Di era digital, brand Polri sebagai institusi juga sangat bergantung pada bagaimana anggota Polri, terutama yang lebih muda, berinteraksi dengan masyarakat di media sosial. Polri harus memastikan bahwa setiap anggota memahami dampak dari perilaku online mereka terhadap citra institusi. Media sosial bisa

menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, tetapi juga bisa dengan cepat menghancurkan reputasi jika digunakan dengan cara yang salah. Oleh karena itu, Polri harus lebih aktif dalam memberikan pembekalan mengenai penggunaan media sosial yang bijaksana dan etis, serta membangun kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan di dunia maya harus mencerminkan integritas dan nilai-nilai Polri.

Penting untuk menciptakan kebijakan yang jelas mengenai penggunaan media sosial oleh anggota Polri, dengan pedoman yang mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan etika. Polri harus memperkuat pengawasan terhadap perilaku anggota di dunia digital, agar setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi. Pengawasan ini juga harus memperhatikan bagaimana Polri merespons kritik yang muncul di media sosial dengan bijaksana dan berbasis pada solusi yang konstruktif, tanpa terbawa emosi atau reaksi yang tidak profesional.

Pendidikan etika bagi anggota Polri yang lebih muda harus mencakup tidak hanya pengajaran tentang aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus diberi kesadaran tentang pentingnya mempertahankan etika dan profesionalisme dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik itu dalam penegakan hukum di lapangan maupun dalam interaksi mereka di dunia digital.

Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan memasukkan aspek pendidikan etika digital ke dalam setiap tahapan pembelajaran dan pembinaan anggota Polri. Mulai dari pendidikan dasar hingga pelatihan berkelanjutan, Polri perlu memberikan pelatihan mengenai pentingnya etika dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari menjaga privasi, menghindari

ujaran kebencian, hingga bagaimana cara berkomunikasi yang profesional di media sosial.

C. Mengembangkan Pendidikan Etika yang Adaptif

Pendidikan etika di Polri harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Seiring dengan perubahan zaman dan teknologi yang semakin maju, tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjaga integritas dan profesionalisme juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan kurikulum yang mencakup topik-topik baru yang relevan dengan perubahan tersebut, seperti etika digital, penyalahgunaan teknologi, dan etika dalam berinteraksi di media sosial. Pendidikan etika yang adaptif tidak hanya membantu anggota Polri dalam mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan dengan sikap yang profesional dan berintegritas.

Pembaruan kurikulum pendidikan etika di Polri harus dilakukan secara berkala untuk mencakup isu-isu terkini yang berkaitan dengan teknologi, sosial media, dan tantangan moral yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Kurikulum yang tidak berkembang seiring dengan waktu dapat membuat anggota Polri kurang siap menghadapi tantangan baru yang muncul. Oleh karena itu, topik-topik seperti etika digital, penyalahgunaan teknologi, dan etika dalam berinteraksi di media sosial perlu dimasukkan ke dalam materi pelatihan etika yang wajib diikuti oleh seluruh anggota Polri.

Sebagai contoh, dengan pesatnya perkembangan media sosial, anggota Polri perlu diajarkan mengenai etika dalam penggunaan platform digital, seperti cara menjaga profesionalisme di dunia maya, menghindari penyebaran informasi yang tidak benar, serta berinteraksi dengan masyarakat secara etis di media sosial. Selain itu, pembaruan kurikulum harus mencakup

pembelajaran tentang penyalahgunaan teknologi, seperti penggunaan data pribadi secara tidak sah atau penyalahgunaan akses terhadap sistem informasi. Materi ini penting untuk melindungi integritas anggota Polri dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

Pembaruan kurikulum di beberapa negara sudah memasukkan aspek etika digital dalam pelatihan anggota kepolisian. Misalnya, di beberapa negara maju, anggota kepolisian diberikan pelatihan khusus mengenai penggunaan teknologi digital dalam penegakan hukum, yang mencakup bagaimana menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana menghindari pelanggaran privasi atau penyalahgunaan informasi pribadi.

Selain teori, pembelajaran etika di Polri juga harus berbasis pengalaman nyata dan studi kasus. Pembelajaran yang hanya berfokus pada teori tanpa adanya kontekstualisasi dunia nyata sering kali tidak memberikan gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana etika diterapkan dalam situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan studi kasus nyata menjadi sangat penting. Anggota Polri dapat memahami konsekuensi nyata dari tindakan yang melanggar etika, serta belajar dari kesalahan yang telah terjadi, untuk menghindari situasi serupa di masa depan.

Studi kasus nyata memungkinkan anggota Polri untuk menganalisis berbagai skenario yang mungkin mereka hadapi di lapangan, seperti interaksi dengan masyarakat yang penuh tekanan, atau bagaimana menangani kasus yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan mempelajari kasus-kasus yang telah terjadi, anggota Polri bisa lebih memahami dampak dari setiap keputusan yang diambil, baik dari sisi hukum, sosial, maupun moral.

Selain itu, simulasi situasi nyata atau role-playing juga dapat digunakan sebagai metode pembelajaran interaktif yang sangat efektif. Dengan berpartisipasi dalam simulasi atau diskusi kelompok, anggota Polri bisa mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana seharusnya bertindak dalam menghadapi tantangan etika, serta berdiskusi tentang solusi yang terbaik.

Sebuah pelatihan berbasis kasus dilakukan dalam simulasi penanganan demonstrasi yang berpotensi mengarah pada penggunaan kekuatan. Anggota Polri diberikan skenario yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah akan menggunakan kekuatan fisik atau menyelesaikan masalah dengan dialog. Dalam proses ini, peserta didorong untuk mempertimbangkan aspek etika dan hukum, serta dampak jangka panjang dari keputusan mereka terhadap hubungan Polri dengan masyarakat.

Metode pembelajaran yang interaktif sangat penting dalam pendidikan etika, karena membantu anggota Polri untuk lebih memahami dan meresapi materi yang diajarkan. Simulasi kasus, diskusi kelompok, dan peran serta aktif dalam skenario yang realistis memungkinkan anggota Polri untuk mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang etis di dunia nyata. Ini juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk berlatih bagaimana merespons tekanan atau situasi yang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang terbatas.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pelatihan juga menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan pendidikan etika yang lebih mudah diakses oleh anggota Polri di berbagai daerah. Dengan adanya platform e-learning, anggota Polri dapat mengikuti pelatihan etika secara fleksibel, tanpa harus terikat oleh lokasi atau jadwal yang terbatas. E-learning memungkinkan pelatihan yang lebih terstruktur dan dapat diakses kapan saja dan

di mana saja, sehingga dapat mencakup anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Platform e-learning yang digunakan Polri untuk pelatihan etika memungkinkan anggota Polri untuk mengikuti modul-modul yang mencakup berbagai topik seperti etika digital, penanganan konflik, dan prinsip keadilan. Setiap modul diakhiri dengan kuis atau tugas yang menguji pemahaman anggota mengenai topik yang telah dipelajari. Platform ini memungkinkan pengajaran yang lebih luas dan dapat menjangkau anggota yang berada di daerah-daerah terpencil, sehingga pendidikan etika tidak terbatas pada wilayah tertentu saja.

Selain e-learning, penggunaan aplikasi simulasi untuk melatih anggota Polri dalam menghadapi situasi etika yang kompleks juga bisa menjadi alternatif yang sangat efektif. Misalnya, aplikasi simulasi yang dirancang untuk menguji keputusan-keputusan yang diambil oleh anggota Polri dalam situasi yang penuh tekanan, seperti mengelola kerusakan atau menangani demonstrasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Aplikasi ini memungkinkan anggota Polri untuk berlatih dalam suasana yang realistis dan menerima umpan balik langsung mengenai keputusan yang mereka buat.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Etika

Kesadaran etika di tubuh Polri tidak hanya bergantung pada upaya internal institusi tersebut, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Sebagai pihak yang dilayani, masyarakat memiliki hak untuk memahami, mengawasi, dan bahkan berkontribusi dalam menjaga etika di Polri. Ketika masyarakat teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka, serta memahami cara mengawasi dan melaporkan pelanggaran etika, mereka dapat menjadi mitra yang sangat penting dalam memastikan bahwa Polri bertindak secara

adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum.

Kolaborasi antara Polri dan masyarakat, terutama dalam konteks pengawasan etika, akan memperkuat upaya menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan etis. Masyarakat yang aktif dalam pengawasan tidak hanya membantu mendeteksi pelanggaran yang mungkin terjadi, tetapi juga memberikan dukungan kepada Polri dalam menjalankan tugasnya dengan integritas. Membangun pemahaman bersama tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas antara Polri dan masyarakat dapat mendorong terciptanya suasana saling menghargai dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama: penegakan hukum yang adil dan efektif.

Edukasi publik tentang etika dan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Banyak individu dalam masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam berinteraksi dengan Polri atau tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai cara mengawasi kinerja Polri, apa yang merupakan pelanggaran etika, dan bagaimana cara melaporkan hal tersebut sangat penting.

Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum, seperti hak untuk diperlakukan dengan adil dan manusiawi, serta hak untuk mendapatkan informasi yang transparan terkait tindakan Polri. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara melibatkan diri dalam pengawasan, maka mereka akan lebih percaya diri dalam melaporkan pelanggaran atau ketidakadilan yang mereka saksikan.

Selain itu, edukasi publik juga penting untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat sering kali hanya melihat hasil akhir dari tindakan Polri, tanpa memahami kompleksitas atau kendala yang ada di lapangan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi Polri, seperti beban kerja yang berat, tekanan sosial, atau keterbatasan sumber daya, masyarakat dapat lebih memahami konteks di balik keputusan yang diambil oleh anggota Polri, serta lebih mendukung upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Sebagai bagian dari upaya edukasi, Polri dapat mengadakan program-program yang melibatkan masyarakat, seperti diskusi publik, seminar, atau workshop mengenai etika dan prinsip dasar penegakan hukum. Dalam program ini, Polri tidak hanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara yang tepat untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih baik antara Polri dan masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi ketegangan atau miskomunikasi yang sering terjadi antara keduanya.

Selain mendukung melalui pendidikan, masyarakat juga berperan dalam memberikan pengawasan yang konstruktif terhadap Polri. Dalam era informasi yang cepat dan terbuka seperti sekarang, pengawasan masyarakat menjadi lebih efektif berkat adanya media sosial dan platform pengaduan online. Masyarakat yang lebih sadar akan hak-haknya dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri melalui saluran yang tersedia. Namun, untuk pengawasan tersebut menjadi efektif, sangat penting bagi masyarakat untuk melakukannya dengan cara yang berbasis pada fakta dan tanpa menyebarkan informasi yang tidak akurat atau hoaks.

Kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan Polri dalam hal pengawasan etika hanya akan tercapai jika masyarakat

dilibatkan dengan cara yang konstruktif. Pengawasan yang dilakukan dengan bijak dan berdasarkan pada informasi yang jelas dan terverifikasi akan memberikan dampak positif, baik untuk Polri maupun masyarakat itu sendiri. Jika Polri merasa bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan bukan untuk menjatuhkan institusi, maka Polri akan lebih terbuka untuk menerima masukan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Salah satu contoh keberhasilan kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam pengawasan etika adalah keberadaan platform pengaduan yang aman dan transparan, seperti aplikasi mobile atau situs web yang disediakan oleh Kompolnas. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran etika dengan mudah dan tanpa rasa takut akan pembalasan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang viral di media sosial, banyak masyarakat yang melalui platform tersebut memberikan laporan atau pengaduan yang memicu tindakan cepat dari Polri untuk melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tepat. Proses ini tidak hanya menunjukkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Polri dalam menjaga integritas.

Kolaborasi yang erat antara Polri dan masyarakat dalam menjaga etika dan profesionalisme akan menciptakan atmosfer saling menghargai. Ketika masyarakat merasa bahwa Polri terbuka terhadap kritik dan siap untuk memperbaiki diri, maka kepercayaan terhadap institusi ini akan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya, ketika Polri mendengarkan masukan dan pengawasan masyarakat secara konstruktif, mereka tidak hanya dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berkomitmen pada prinsip keadilan dan transparansi.

Pendidikan etika untuk masyarakat juga harus mencakup pemahaman tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga keadilan dan etika dalam penegakan hukum. Ini akan membantu menciptakan hubungan yang lebih positif, di mana masyarakat dan Polri bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan tertib.

Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil adalah program "Polisi Kita, Polisi Anda" yang melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka dengan Polri untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan etika, penegakan hukum, dan hak-hak masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran etika di masyarakat, tetapi juga membangun rasa percaya yang lebih kuat antara Polri dan masyarakat. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman kedua belah pihak mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengurangi ketegangan yang sering muncul antara Polri dan publik.

Daftar Pustaka

- Agger, B. (2004). *The Virtual Self: A Contemporary Sociology*. Blackwell Publishing.
- Aspinall, E. & Fealy, G. (Eds.). (2010). *Soeharto's New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*. ANU E Press.
- Barker, C. (2004). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bayley, D. H. (2006). *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. Oxford University Press.
- Bruns, A. (2008). *Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage*. Peter Lang.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denhardt, R. B., Denhardt, J. V., & Aristigueta, M. P. (2013). *Managing Human Behavior in Public and Nonprofit Organizations (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Fachruddin, F. (2022). *Etika Profesi dan Kode Etik*. Bandung: Alfabeta.
- Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). Peraturan Polri Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). (2019). *Laporan Tahunan Kompolnas 2019*. Jakarta: Sekretariat Kompolnas.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.

- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Robinson, M., & Parry, R. (2001). Ethics Training for Public Officials. *Public Management Review*, 3(4), 541–556.
- Santoso, T. (2010). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryono. (2017). *Etika Profesi Kepolisian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tapscott, D. (2009). *Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World*. McGraw-Hill.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*. Jakarta: TII.
- Wiryono, W. (2021). *Sosiologi Hukum: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Genta Press.

Profil Penulis



Dr. Kusnida Indraajaya, M.Si, Lahir di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1974, saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Palangka Raya dan dosen tetap pada program studi Magister Pendidikan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya. Aktif berkegiatan di bidang Kepemudaan, Pendidikan Pelatihan, Literasi dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai

fasilitator, narasumber dan peneliti. Buku dan karya yang telah diterbitkan antara lain Buku Pendidikan Masyarakat, Kepemudaan, Pendidikan dan Pelatihan, Difusi Inovasi serta sejumlah karya lainnya dalam bentuk buku, jurnal dan artikel ilmiah yang terbit didalam dan diluar negeri.



Tri Siswanti lahir di Kabupaten Temanggung tanggal 9 April 1979. Menempuh pendidikan dasar di SD Remaja (1986-1991), dan di SMP Remaja Kota Parakan (1992-1994). Pendidikan menengah di SPK Ngesti Waluyo Kota Parakan (1995-1997). Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah

Palangka Raya (2008-2011) mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara (M.A.P). Pada Oktober 2006, penulis mengabdikan dirinya bekerja di Polda Kalimantan Tengah sekaligus pada tahun menjabat Kepala Urusan Perencanaan dan Administrasi Staf Pribadi Pimpinan. Pada tahun 2017 serta dipercaya menjadi *Instructor Counter Messaging Course* oleh *INTERNASIONAL CRIMINAL INVESTIGATIVE TRAINING ASSISTANCE PROGRAM US Departement Of Justice*.

Di tengah kesibukannya sebagai PNS Polri, penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata Dua (S2) di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan (September, 2011–19 Juni 2013) dengan mengambil program studi Magister Administrasi Publik (M.A.P). Penulis telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya (S3) pada Program Studi Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Malang (2020) dengan predikat cumlaude.

Selain bertugas di Polda Kalimantan Tengah, penulis mengajar di Universitas Negeri Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. Penulis mengampu mata kuliah Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial Politik, dengan penekanan utamanya pada motivasi internalisasi Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Publik. Aktivitasnya ini dilakukan pada beberapa kegiatan Kuliah Praktek Lapangan dan peningkatan

kualitas pembelajaran. Pada pertengahan-akhir 2019, penulis dipercaya menjabat sebagai Kepala Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Kasubbagsisinfo) Bagian Reformasi Birokrasi Polri di Polda Kalimantan Tengah. Di sela-sela kesibukannya, sosok yang konsisten ini aktif dalam bidang tulis-menulis. Hal ini, salah satunya, karena didukung keterampilannya mengetik sepuluh jari secara cepat dan tepat. Salah satu karya yang pernah diterbitkan adalah artikel berjudul *"Normalization of Dream State Police Stigma"* (Jurnal Palangka Raya, 2019).

Pada tahun 2024 penulis dipercaya menjabat sebagai Gadik Madya Polda Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang, serta Kembali membuat buku-buku. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hak_cipta@trisa.wanto1.com.



Alrakhaa Heppy Mantir adalah seorang pelajar di SMAN 2 Palangkaraya yang memiliki kecintaan mendalam pada dunia literasi. Berawal dari hobi membaca yang menjadi napas kesehariannya, Alrakhaa kini mulai mengeksplorasi kemampuannya dalam merangkai kata dan berbagi pemikiran melalui tulisan.

Sebagai penulis muda, ia percaya bahwa membaca adalah kunci untuk memahami dunia, sementara menulis adalah cara untuk meninggalkan jejak inspirasi bagi orang lain. Di sela kesibukannya sebagai siswa, Alrakhaa terus mendedikasikan waktu untuk mengasah kreativitas dan memperluas wawasan lewat lembaran-lembaran buku yang ia nikmati

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan pergeseran nilai-nilai sosial, Polri tidak hanya dihadapkan pada tantangan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga pada tantangan moral yang menguji integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil. Buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penguatan etika di Polri, termasuk pembekalan pendidikan etika, penguatan kepemimpinan yang beretika, serta pentingnya pengawasan eksternal yang objektif.

Buku berjudul **Etika Profesi Polri, Tantangan Integritas Dan Brand Institusi Di Era Milenial** ini hadir untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pentingnya etika dan integritas dalam profesi kepolisian, serta tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan tugasnya di era milenial. Dalam perjalanan sejarahnya, Polri telah berperan sebagai lembaga yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, namun tantangan yang terus berkembang di dunia digital dan perubahan sosial yang pesat menuntut adanya transformasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal etika profesi.

Dalam konteks reformasi Polri yang terus berlanjut, buku ini juga mengulas bagaimana Polri dapat menjadi agen perubahan sosial yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat melalui prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme. Penguatan brand institusi Polri yang berintegritas di mata publik menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat, serta menciptakan Polri yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan zaman.

Melalui buku ini, pembaca dapat memahami pentingnya peran etika dalam menjaga profesionalisme Polri, serta bagaimana Polri dapat terus berkembang menjadi lembaga yang lebih akuntabel, responsif, dan dapat diandalkan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemikiran mengenai reformasi kepolisian di Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-129-6

